



Katalog BPS: 2102027



MIGRASI INTERNAL PENDUDUK INDONESIA

Hasil Sensus Penduduk 2010

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

MIGRASI INTERNAL PENDUDUK INDONESIA

Hasil Sensus Penduduk 2010

<https://www.sps.go.id>

9711

MIGRASI INTERNAL PENDUDUK INDONESIA

HASIL SENSUS PENDUDUK 2010

ISBN: 978-979-064-307-9

No. Publikasi: 04000.1102

Katalog BPS: 2102027

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: viii + 38 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Demografi

Penulis:

Dendi Handiyatmo

Penyunting:

1. Suhariyanto

2. Rini Savitridina

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Data hasil Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010) mengandung banyak informasi yang relevan dan perlu bagi bangsa maupun dunia internasional. Bahkan dunia ilmu pengetahuan akan berkembang pesat karena data dan informasi statistik ini akan menjadi temuan-temuan baru.

Gambaran ringkas dari hasil SP2010 mengenai berbagai hal disajikan dalam buku beberapa buku secara seri. Buku "**Migrasi Internal Penduduk Indonesia**" ini adalah salah satu seri yang menggambarkan situasi dan perkembangan indikator kependudukan menyangkut migrasi internal penduduk.

Sudah barang tentu data dan informasi yang bisa dimuat dalam buku ini hanya bersifat ringkas, menyangkut isu-isu pokok saja. Meskipun demikian informasi tersebut akan cukup menggugah pembaca untuk mengkaji lebih jauh, lebih dalam, dan lebih kompleks terkait data dan informasi migrasi internal penduduk.

Data dan informasi lain yang bisa diakses oleh publik tersedia pada website BPS dengan alamat: <http://sp2010.bps.go.id>. Dengan penyajian *online* itu akan lebih banyak data dan penjelasan yang dapat diperoleh serta lebih mudah mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja.

Data hasil SP2010 merupakan aset bangsa Indonesia yang sangat terbuka untuk dieksplorasi oleh para pakar dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Dari data dan informasi tersebut bisa diperhitungkan berbagai aspek sosial ekonomi, seperti segmentasi pasar, sumber daya manusia, kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), serta potensi ketahanan nasional atau wilayah.

Terakhir, kami selaku penghasil data dan informasi statistik mengajak semua pihak memanfaatkan secara optimal data dan informasi statistik hasil SP2010 sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat dan bangsa Indonesia di dalam negeri maupun di dunia internasional.

Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kasih, menyertai statistik Indonesia sekarang dan selama-lamanya.

Jakarta, Oktober 2011
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Rusman Heriawan

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
2. METODOLOGI	3
2.1. Sumber Data	3
2.2. Definisi Operasional	4
3. MIGRASI INTERNAL	7
3.1. Migrasi Seumur Hidup	7
3.1.1. Besaran dan Arus Migrasi Seumur Hidup	7
3.1.2. Tempat Tinggal Migran Seumur Hidup	9
3.1.3. Umur dan Jenis Kelamin Migran Seumur Hidup	11
3.2. Migrasi Risen	12
3.2.1. Besaran dan Arus Migrasi Risen	13
3.2.2. Pola Migrasi Provinsi	16
3.2.3. Tempat Tinggal Migran Risen	17
3.2.4. Umur dan Jenis Kelamin Migran Risen	18
3.2.5. Pendidikan Migran Risen	20
3.2.6. Pekerjaan Migran Risen	22
3.2.7. Hubungan Struktur Umur dan Migrasi	23
3.3. Migrasi Neto	25
4. TREN MIGRASI INTERNAL 1990–2010	27
4.1. Tren Migrasi Seumur Hidup	27
4.2. Tren Migrasi Risen	29
4.3. Tren Migrasi Neto Risen	31
5. PENUTUP	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Persentase Migran Masuk Seumur Hidup di Tiga Provinsi, 2010	7
Tabel 2	Persentase Migran Seumur Hidup Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2010 ..	12
Tabel 3	Persentase Migran Masuk Risen di Tiga Provinsi, 2010	13
Tabel 4	Persentase Migran Risen Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2010	19
Tabel 5	Persentase Umur Migran Masuk Risen di Jawa Tengah dan Kepulauan Riau, 2010	20
Tabel 6	Migran Risen Menurut Pendidikan Tertinggi, 2010	21
Tabel 7	Migrasi Sebagai Penambah Penduduk, 2010	25
Tabel 8	Migrasi Sebagai Pengurang Penduduk, 2010	25

<https://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup, 2010	8
Gambar 2	Provinsi Lahir Migran Seumur Hidup, 2010	9
Gambar 3	Persentase Migran Seumur Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010	10
Gambar 4	Distribusi Umur Migran Seumur Hidup, 2010	11
Gambar 5	Provinsi Tujuan Migran Risen, 2010	14
Gambar 6	Provinsi Asal Migran Risen, 2010	15
Gambar 7	Persentase Migran Masuk Risen ke Provinsi Kepulauan Riau, 2010	16
Gambar 8	Persentase Migran Risen Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010	17
Gambar 9	Pola Umur Migran Risen, 2010	18
Gambar 10	Persentase Migran Risen Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010	21
Gambar 11	Persentase Migran Risen Menurut Lapangan Pekerjaan, 2010	22
Gambar 12	Persentase Migran Risen Menurut Status Pekerjaan, 2010	23
Gambar 13	Piramida Penduduk Jawa Tengah, 2010	23
Gambar 14	Migran Keluar Jawa Tengah, 2010	24
Gambar 15	Tren Persentase Migran Seumur Hidup 1990-2010	28
Gambar 16	Tren Persentase Migran Risen, 1990-2010	30
Gambar 17	Tren Persentase Migran Neto Risen, 1990-2010	32

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel L1	Persentase Migran Seumur Hidup, SP2010	41
Tabel L2	Persentase Migran Risen, SP2010	42
Tabel L3	Tren Persentase Migran Seumur Hidup 1990-2010	43
Tabel L4	Tren Persentase Migran Risen, 1990-2010	44
Tabel L5	Tren Persentase Migran Neto Risen, 1990-2010	45

<https://www.bps.go.id>

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan penyajian data demografi, ekonomi dan sosial yang menyangkut semua penduduk/orang pada waktu tertentu di suatu negara atau suatu wilayah. Sensus penduduk di Indonesia biasa disebut pencacahan penduduk, yaitu pengumpulan data/informasi yang dilakukan terhadap seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia. Data yang dikumpulkan antara lain: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, agama, kewarganegaraan, pekerjaan, dan tempat lahir. Hasilnya adalah data jumlah penduduk beserta karakteristiknya, yang sangat berguna sebagai bahan perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi penduduk, perumahan, pendidikan dan ketenagakerjaan sampai wilayah administrasi terkecil.

Sesuai dengan UU No.16 tahun 1997 pasal 8 ayat 1 menghendaki agar sensus penduduk di Indonesia dilaksanakan sekali dalam setiap 10 tahun dan sejalan dengan rekomendasi PBB, maka pada tahun 2010 Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk. SP2010 merupakan sensus penduduk yang ke enam sejak Indonesia merdeka. Sebelumnya sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000.

Kegiatan SP2010 dilaksanakan di seluruh wilayah geografis Indonesia yang meliputi 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.651 kecamatan dan 77.126 desa/kelurahan. Disamping itu dilakukan juga pendataan melalui e-census (email dan website) terhadap duta besar perwakilan RI dan keluarganya di Luar Negeri. Kelengkapan cakupan merupakan masalah yang penting dalam sensus penduduk sehingga dapat dipastikan tidak ada rumah tangga ataupun anggota rumah tangga yang terlewat atau tercacah dua kali. Hasil SP2010 ini diharapkan dapat menjadi rujukan utama data dasar kependudukan.

Penduduk dalam satu wilayah menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan juga menjadi target pembangunan. Pengambilan kebijakan di suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, serta kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan

Secara umum tujuan dilaksanakannya SP2010 adalah:

- 1) Mengumpulkan dan menyajikan data dasar kependudukan sampai wilayah administrasi terkecil.
- 2) Membentuk Kerangka Sampel Induk (KSI) untuk kepentingan survei-survei lain yang dilakukan dengan pendekatan rumah tangga.
- 3) Memperkirakan berbagai parameter kependudukan sampai wilayah administrasi tertentu.
- 4) Mengumpulkan informasi kependudukan yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk penyusunan basis data kependudukan.

Publikasi eksklusif ini merupakan bagian dari seri publikasi hasil SP2010 yang mengulas migrasi internal penduduk Indonesia. Tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran perpindahan penduduk antar provinsi di Indonesia serta karakteristiknya. Secara khusus penulisan migrasi internal penduduk Indonesia bertujuan:

- 1) Memberikan gambaran keadaan perpindahan penduduk Indonesia.
- 2) Mengukur besaran perpindahan penduduk di Indonesia untuk masing-masing provinsi.
- 3) Memberikan gambaran karakteristik pelaku migrasi di Indonesia.
- 4) Menunjukkan arus perpindahan penduduk yang terjadi di Indonesia.
- 5) Memberikan penjelasan perubahan perpindahan penduduk Indonesia.
- 6) Memberikan penjelasan dampak migrasi terhadap komposisi penduduk di Indonesia.

1.3 Sistematika Penulisan

Tulisan ini disusun dalam 4 bab, Bab 1. Pendahuluan, Bab 2. Metodologi, Bab 3. Migrasi Internal, Bab 4. Tren Migrasi Internal 1990-2010, Bab 5. Penutup. Selain lima bab tersebut, tulisan ini juga memuat beberapa catatan teknis mengenai data serta tabel-tabel tambahan yang semua tercakup dalam lampiran.

2. METODOLOGI

Migrasi memiliki peran yang signifikan dalam membentuk dan mempengaruhi komposisi penduduk suatu wilayah disamping kelahiran dan kematian. Ketiganya merupakan faktor yang akan menentukan pertumbuhan penduduk suatu wilayah. Dikenal juga istilah migrasi masuk (datang) dan migrasi keluar (pergi), sehingga migrasi akan mempengaruhi komposisi penduduk baik sebagai pengurang atau pun sebagai penambah.

Migrasi sesungguhnya sudah terjadi sejak lama bahkan sejak manusia ada demikian juga yang terjadi di Indonesia. Bukti-bukti migrasi di Indonesia berupa budaya, bahasa dan peninggalan sejarah dapat ditemukan. Sayangnya data migrasi di waktu lampau tidak kita miliki. Kejadian migrasi pada jaman yang modern atau setelah abad 20 ini sebagian terekam dalam pertanyaan pada sensus penduduk yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada Sensus Penduduk 1971, 1980, 1990, dan 2000 pertanyaan tentang migrasi telah dicakup.

Publikasi ini menerangkan tentang migrasi internal penduduk Indonesia berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Migrasi penduduk yang dipotret merupakan gambaran perpindahan penduduk antar provinsi di wilayah Republik Indonesia. Keterangan migrasi dikumpulkan berdasarkan pertanyaan pada SP2010 yang mencakup seluruh penduduk yang berada di wilayah teritorial Indonesia. Suatu prestasi besar bahwa SP2010 dapat mengumpulkan keterangan mengenai perpindahan dari 237 juta penduduk Indonesia. Data ini merupakan informasi yang lengkap dan bermanfaat yang dapat membantu menjawab permasalahan berkaitan dengan kondisi dan komposisi penduduk di wilayah-wilayah yang menjadi bagian dari Republik Indonesia.

2.1 Sumber Data

Sensus penduduk merupakan sumber utama dalam penyediaan data migrasi yang berskala nasional di Indonesia. Pada sensus sebelumnya tahun 1971, 1990, 1980 dan 2000 juga diperoleh data tentang migrasi dengan konsep yang sama.

Data migrasi dengan cakupan yang lengkap dapat diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2000 dan 2010 dimana gambaran perpindahan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Sementara tahun 1971, 1980, dan 1990 merupakan hasil sensus sampel dan perpindahan yang dihasilkan sebatas tingkat provinsi saja. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan migrasi dapat diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik seperti Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 1976; 1985; 1995; 2005, Modul Kependudukan 2000 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2011.

Data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah SP2010. Sumber data lain seperti SP1990, SP2000 dan SUPAS2005 digunakan untuk menjelaskan tren dan sebagai penunjang dari temuan yang dihasilkan.

2.2 Definisi Operasional

a. Penduduk

Dalam SP2010, pencacahan penduduk menggunakan konsep “*de jure*” atau konsep “dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal” (*usual residence*) dan konsep “*de facto*” atau konsep “dimana seseorang berada pada saat pencacahan”. Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal tetap.

Penduduk suatu wilayah didefinisikan sebagai orang yang biasa (sehari-hari) tinggal di wilayah itu. Cara ini disebut juga menggunakan konsep *usual residence*. Pencatatan penduduk dilakukan secara aktif, yaitu petugas pendata mendatangi penduduk dari rumah ke rumah (*door to door*). Penduduk yang disensus di rumah tangga meliputi:

- bayi yang baru lahir,
- tamu yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, termasuk tamu yang belum tinggal 6 bulan tetapi sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih,
- orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap,
- pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang tinggal dan makannya dalam rumah tangga yang sama, dan
- orang yang mondok (indekost) dengan makan.

b. Rumah Tangga

Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta pengelolaan makannya dari satu dapur. Satu rumah tangga dapat terdiri dari hanya satu anggota rumah tangga. Yang dimaksud dengan satu dapur adalah pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola menjadi satu.

c. Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT

d. Anggota Rumah Tangga

Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu listing maupun yang sementara tidak berada di rumah.

e. Umur

Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir.

f. Migrasi

Untuk mendapatkan keterangan tentang migrasi diperlukan suatu konsep yang dapat digunakan untuk menangkap informasi perpindahan dari seseorang. Konsep migrasi juga berhubungan dengan konsep penduduk, dimana seseorang harus jelas dihitung sebagai penduduk di wilayah mana, sehingga ini akan menjadi acuan dalam mengkategorikan seseorang sebagai migran atau bukan migran.

Berbeda dengan kelahiran dan kematian dimana kejadian ini hanya sekali dialami oleh manusia, migrasi dapat terjadi lebih dari sekali selama hidup manusia. Untuk itu penting memberikan batasan waktu yang dipakai agar titik-titik rekaman atau potret migrasi selalu dapat dibandingkan antar periode. Perbedaan lainnya pada pengelompokan migrasi adalah adanya dua lokasi yang berbeda yaitu daerah asal dan daerah tujuan tanpa memperhatikan jarak apakah dekat atau jauh. Dengan demikian penentuan migrasi bergantung dari batas administratif atau batas politik yang dipakai.

Migrasi dalam arti luas ialah perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antara perpindahan di dalam negeri dan atau ke luar negeri. Pada publikasi ini migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif provinsi (migrasi internal).

Batasan waktu migran ditetapkan 6 bulan sejalan dengan konsep tempat tinggal, artinya seorang dikatakan migran jika tinggal ditempat baru atau berniat tinggal ditempat baru paling sedikit 6 bulan lamanya. Keterangan bahwa seorang pernah pindah atau tidak adalah dengan melihat pada adanya perubahan tempat tinggal seseorang. Perbedaan tempat tinggal inilah yang digunakan sebagai proksi migrasi.

Ada tiga pertanyaan pada SP2010 yang dijadikan dasar perhitungan migrasi yaitu keterangan tentang provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal sekarang, pertanyaan mengenai provinsi dan kabupaten/kota tempat lahir dan pertanyaan mengenai provinsi dan kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu. Dalam publikasi ini seseorang diklasifikasikan sebagai migran seumur hidup jika provinsi tempat lahirnya berbeda dari provinsi tempat tinggal sekarang. Seseorang diklasifikasikan sebagai migran risen jika provinsi tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dari provinsi tempat tinggal sekarang.

3. MIGRASI INTERNAL

3.1 Migrasi Seumur Hidup

Migrasi seumur hidup mencerminkan keadaan perpindahan yang terjadi sejak lama. Seseorang dikategorikan sebagai migran seumur hidup jika provinsi tempat lahir berbeda dengan provinsi tempat tinggal sekarang atau tempat tinggalnya saat pencacahan. Secara nasional, persentase migran masuk seumur hidup mencapai 11,7 persen, artinya dari 237,6 juta penduduk Indonesia, 27,8 juta diantaranya tinggal di provinsi yang berbeda dengan tempat lahirnya. Persentase migran masuk seumur hidup terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 2,5 persen dan tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 47,7 persen (Lampiran Tabel L1). Tabel 1 menyajikan persentase migran masuk tertinggi di tiga provinsi.

Tabel 1
Persentase Migran Masuk Seumur Hidup di Tiga Provinsi, 2010

Provinsi	Persentase	Penduduk
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Riau	47,7	1 679 163
DKI Jakarta	42,5	9 607 787
Kalimantan Timur	36,8	3 553 143

Hampir Separuh Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Lahir di Provinsi Lain

Persentase migran seumur hidup terbesar terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan pertama bahkan hampir separuh penduduknya (47,7 persen) lahir di provinsi lain. Demikian pula untuk Provinsi DKI Jakarta di urutan kedua memiliki migran seumur hidup sebesar 42,5 persen dan di Provinsi Kalimantan Timur 36,8 persen penduduknya lahir di provinsi lain.

Keberadaan Provinsi Kepulauan Riau pada urutan pertama dari persentase migran masuk pada periode 20 tahun terakhir berkaitan erat dengan terus tumbuhnya aktivitas perekonomian di provinsi tersebut. Hal ini menggeser posisi DKI Jakarta yang pada era 90-an selalu berada pada peringkat pertama dan melampaui Provinsi Kalimantan Timur pada posisi kedua (Lampiran Tabel L3).

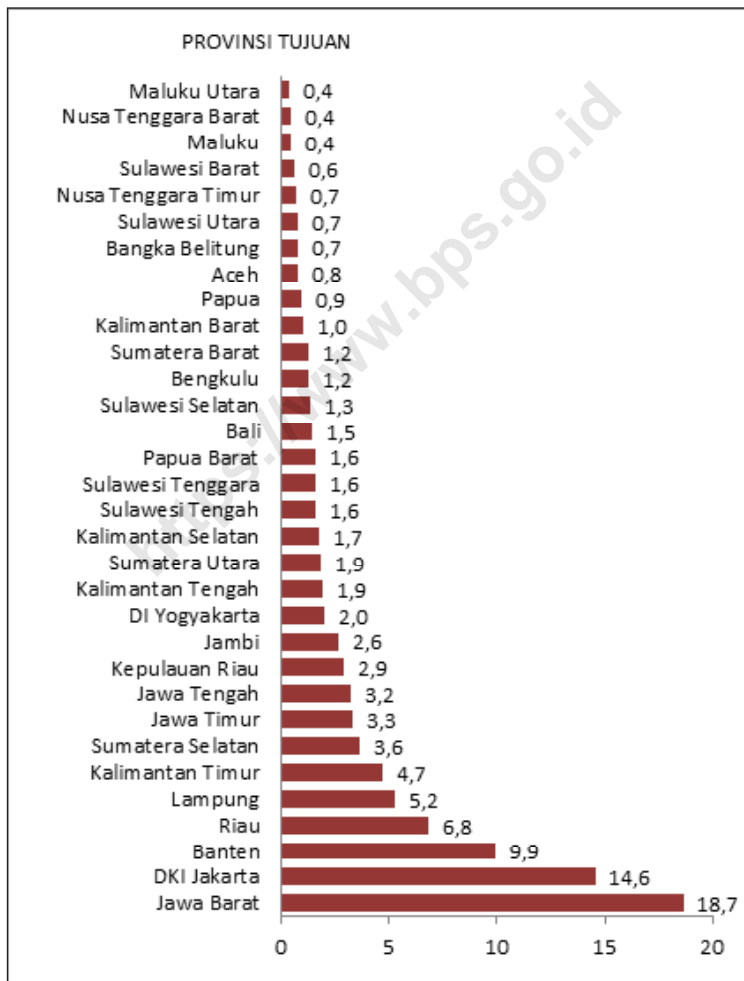
3.1.1 Besaran dan Arus Migrasi Seumur Hidup

Tingginya persentase migran tidak memberikan gambaran besar atau jumlah migran sesungguhnya. Bisa saja karena jumlah migran yang besar bila dibagi jumlah penduduk yang juga besar akan memberikan persentase migran yang rendah. Untuk itu perlu diamati besaran dan arus migrasi antar provinsi.

Satu dari Dua Orang Migran Seumur Hidup menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa

Arus migrasi masuk seumur hidup dapat ditunjukkan pada Gambar 1. Arus ini merupakan distribusi persentase dari seluruh migran seumur hidup ke provinsi tujuan migran. Lima provinsi yang menjadi tujuan utama pindah bagi migran adalah Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Riau, dan Lampung. yang merupakan lebih dari 55 persen dari total migran. Sementara migran yang menuju provinsi di Pulau Jawa sebesar 51,7 persen yang terdiri dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satu dari dua orang migran seumur hidup pindah menuju provinsi-provinsi di pulau jawa.

Gambar 1
Provinsi Tujuan Migran Seumur Hidup, 2010

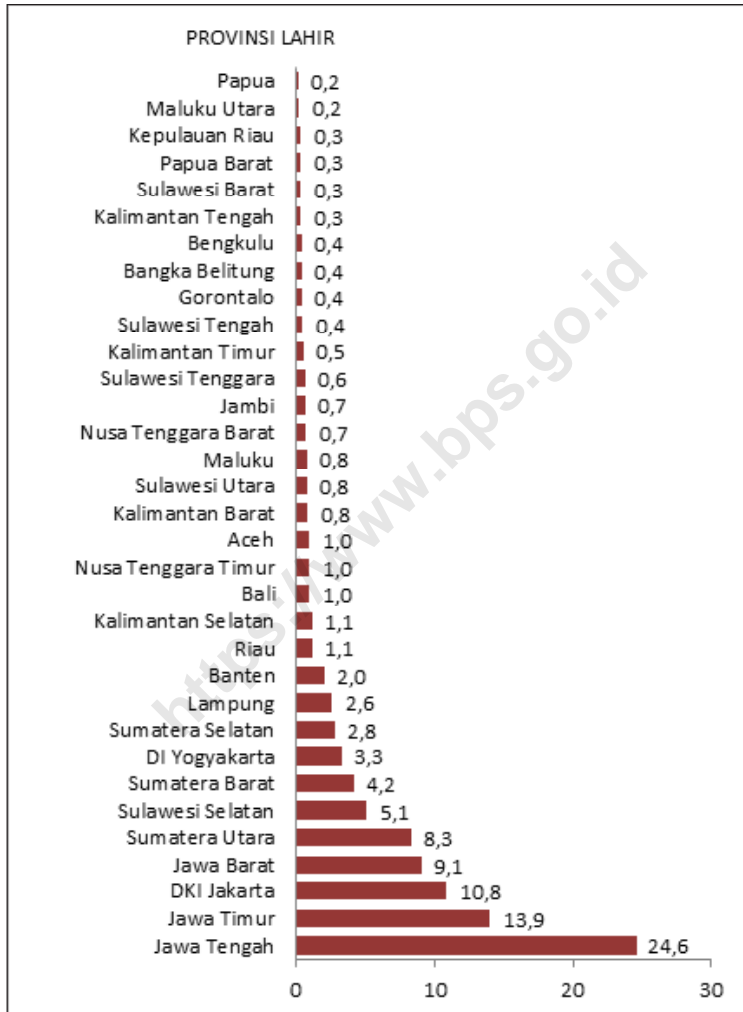


Gambar 2 menampilkan distribusi migran seumur hidup menurut provinsi tempat lahirnya. Daerah asal (tempat lahir) migran seumur hidup didominasi oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Bila diurutkan dari persentase migran terbesar maka provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera

Satu dari Empat Orang Migran Seumur Hidup Lahir di Provinsi Jawa Tengah

Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat merupakan 7 provinsi pengirim migran terbesar di Indonesia.

Gambar 2
Provinsi Lahir Migran Seumur Hidup, 2010

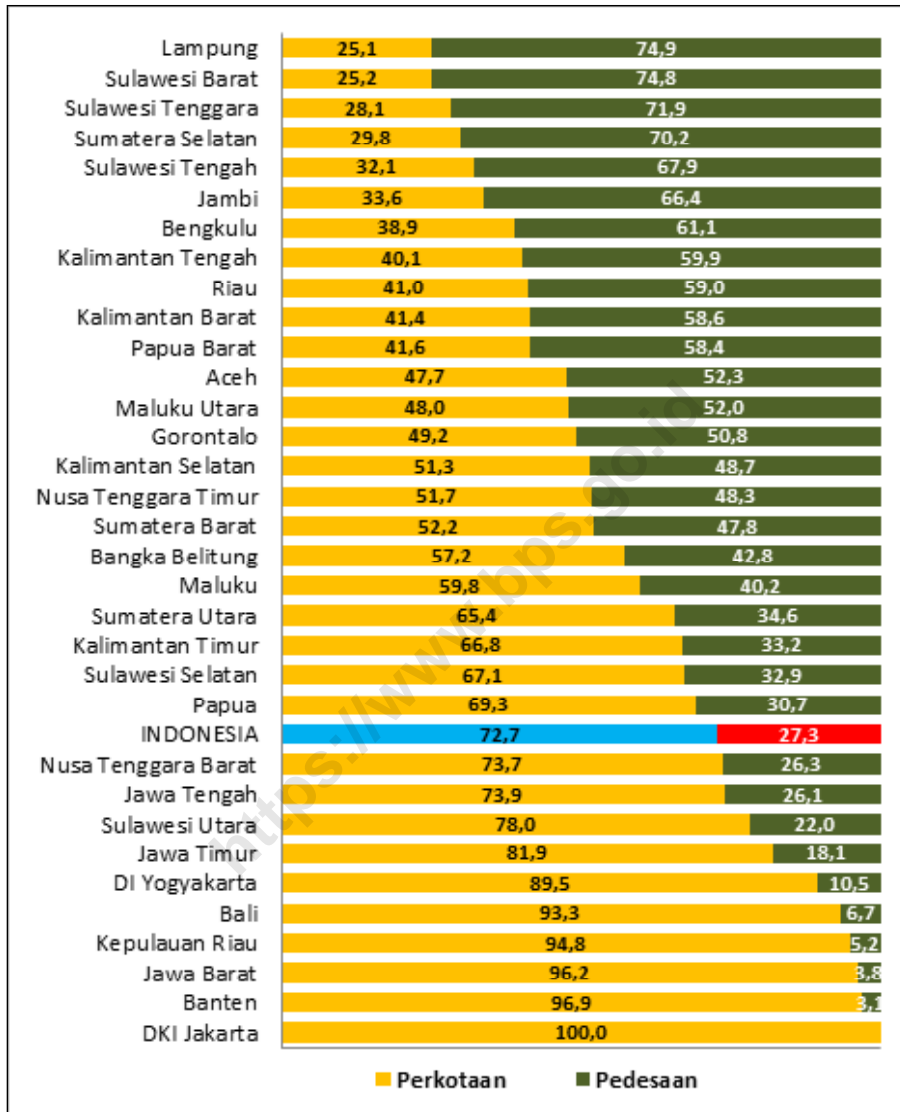


3.1.2 Tempat Tinggal Migran Seumur Hidup

Karakteristik migran dapat dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, jenis kelamin, dan umur. Gambaran migran dapat dilakukan secara lebih rinci mengingat variabel yang dicakup dalam SP2010 cukup banyak. Berikut disajikan karakteristik migran seumur hidup secara umum.

Tiga dari Empat Penduduk Lampung yang Lahir di Provinsi Lain Tinggal di Desa

Gambar 3
Persentase Migran Seumur Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010



Migran lebih banyak yang tinggal di daerah perkotaan. Perbandingan migran yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan adalah 3 : 1 (20,4 juta berbanding 7,6 juta). Hal ini menunjukkan bahwa migran berpindah ke daerah atau wilayah yang lebih maju, misalnya dari daerah pedesaan ke perkotaan atau dari kota kecil ke kota besar, atau migrasi bertahap sesuai dengan salah satu hukum migrasi yang dikemukakan oleh E.G.Ravenstein (1885) seperti dikutip oleh Bogue (1969).

Migran Lebih Suka Tinggal di Kota daripada di Desa

Bila dilihat menurut provinsi, maka proporsi migran terbesar yang tinggal di daerah perkotaan ada di provinsi Banten, Jawa Barat, Kepulauan Riau, Bali, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Hal ini memang terkait dengan sudah tingginya

tingkat urbanisasi di provinsi-provinsi tersebut. DKI Jakarta dalam hal ini tidak dibandingkan karena seluruh wilayah DKI Jakarta merupakan daerah perkotaan (Gambar 3).

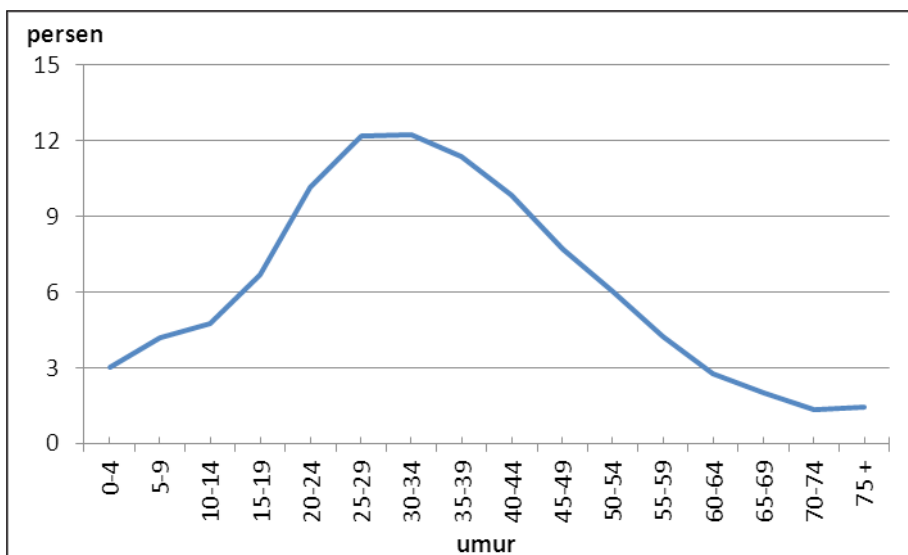
Sementara itu proporsi migran yang tinggal di perkotaan terendah terdapat di Provinsi Lampung, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Rendahnya migran yang tinggal di perkotaan berkaitan dengan masih besarnya proporsi daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan pada provinsi-provinsi tersebut. Pada Provinsi Lampung besarnya migran di pedesaan berkaitan dengan kebijakan kependudukan di masa lalu. Pada program transmigrasi, banyak penduduk dari Pulau Jawa yang dipindahkan menuju Provinsi Lampung dan untuk perpindahan tersebut ditempatkan di daerah pedesaan. Perpindahan yang terjadi merupakan perpindahan dari desa ke desa atau dari kota ke desa.

3.1.3 Umur dan Jenis Kelamin Migran Seumur Hidup

Pola migran seumur hidup menurut kelompok umur menunjukkan pola huruf “U” terbalik. Rendah pada usia dini, selanjutnya meningkat dan mencapai puncaknya pada usia 30-34 tahun serta perlahan menurun pada kelompok usia tua. Persentase tinggi menumpuk pada kelompok-kelompok usia produktif, mulai usia 20-24 tahun sampai dengan kelompok usia 35-39 tahun (Gambar 4).

Bila dilihat dari komposisi umur, hampir pada seluruh kelompok umur terisi. Fenomena ini kemungkinan dapat diartikan bahwa migrasi di Indonesia tidak bersifat individu, tapi berkelompok, seperti kelompok keluarga. Hasil Supas 2005 menunjukkan bahwa secara nasional, 50 persen alasan utama migran pindah adalah alasan keluarga. Alasan keluarga ini mencakup perubahan status perkawinan, ikut suami atau istri atau orang tua atau anak, serta ikut saudara kandung atau famili lain. Pola ini mungkin berbeda dengan di negara maju, dimana kelompok orang-orang yang bermigrasi hanya pada kelompok-kelompok umur tertentu saja.

Gambar 4
Distribusi Umur Migran Seumur Hidup, 2010



Karakteristik jenis kelamin migran secara umum menunjukkan bahwa pelaku migran lebih banyak laki-laki dari pada perempuan. Dengan demikian, hukum migrasi berlaku dimana penduduk laki-laki lebih *mobile* daripada penduduk perempuan dalam melakukan perpindahan internal. Perbandingan persentase antara migran laki-laki dan perempuan adalah 52,7 persen berbanding 47,3 persen. Hal ini berlaku sama hampir pada semua kelompok umur, kecuali pada kelompok umur 15-19 tahun dan kelompok umur tua 75 tahun ke atas (Tabel 2).

Pada kelompok perempuan umur 15-19 tahun ini perpindahan yang dilakukan diduga karena terbukanya kesempatan kerja di sektor domestik dan mudahnya memasuki pasar kerja di sektor informal. Sementara, tingginya persentase migran pada kelompok perempuan umur 75 tahun ke atas diduga karena berkurangnya laki-laki umur 75 tahun ke atas karena kematian. Sebab lain yang mungkin adalah para perempuan ini pindah karena mengikuti anak, anggota keluarga lain atau famili lainnya.

*Penduduk Usia
20-39 Tahun
Cenderung
Bermigrasi*

Tabel 2
Persentase Migran Seumur Hidup Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Migran	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	51,6	48,4	850 912	3,0	106
5-9	51,6	48,4	1 167 184	4,2	107
10-14	51,5	48,5	1 325 821	4,7	106
15-19	49,1	50,9	1 872 975	6,7	96
20-24	50,6	49,4	2 835 669	10,1	102
25-29	51,2	48,8	3 405 116	12,2	105
30-34	52,2	47,8	3 430 552	12,3	109
35-39	53,5	46,5	3 176 792	11,4	115
40-44	54,9	45,1	2 758 209	9,9	122
45-49	54,8	45,2	2 161 703	7,7	121
50-54	55,6	44,4	1 687 340	6,0	125
55-59	56,8	43,2	1 186 538	4,2	132
60-64	54,0	46,0	778 754	2,8	117
65-69	54,3	45,7	556 780	1,9	119
70-74	51,6	48,4	376 951	1,4	106
75 +	49,2	50,8	403 703	1,4	97
Jumlah	52,7	47,3	27 974 999	100,0	111

3.2 Migrasi Risen

Migrasi risen lebih mencerminkan keadaan perpindahan terkini dimana perpindahannya menunjukan keadaan lima tahun yang lalu. Seseorang di kategorikan migran risen jika tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan tempat tinggal sekarang

atau tempat tinggal saat pencacahan. Keterangan mengenai migrasi ini diperoleh secara langsung dari penduduk berumur 5 tahun keatas yang mempunyai tempat tinggal tetap. Secara nasional, persentase migran masuk risen adalah sebesar 2,4 persen (Lampiran Tabel L2), artinya dari 213,9 juta penduduk Indonesia yang ditanya, 5,1 juta jiwa lima tahun yang lalu merasa tinggal di provinsi lain.

Persentase migran menurut provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan persentase migran masuk risen terbesar yaitu 14,0 persen dan Jawa Timur dengan persentase migran masuk terendah yaitu 0,6 persen. Pola migrasi risen ini serupa dengan migrasi seumur hidup. Berikut ditampilkan tiga provinsi yang memiliki persentase imigran risen terbesar.

*Komposisi Penduduk
Kep.Riau Berubah
Akibat Migrasi*

Tabel 3
Persentase Migran Masuk Risen di Tiga Provinsi, 2010

Provinsi	Persentase	Penduduk
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Riau	14,0	1 478 124
DKI Jakarta	7,3	8 777 963
DI Yogyakarta	7,0	3 200 568

Migrasi risen terbesar terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada Provinsi Kepulauan Riau penduduk yang dikategorikan sebagai migran risen sebesar 14 persen dari seluruh penduduknya. Sedangkan di Provinsi DKI Jakarta terdapat 7,3 persen dan Provinsi DI Yogyakarta terdapat 7 persen.

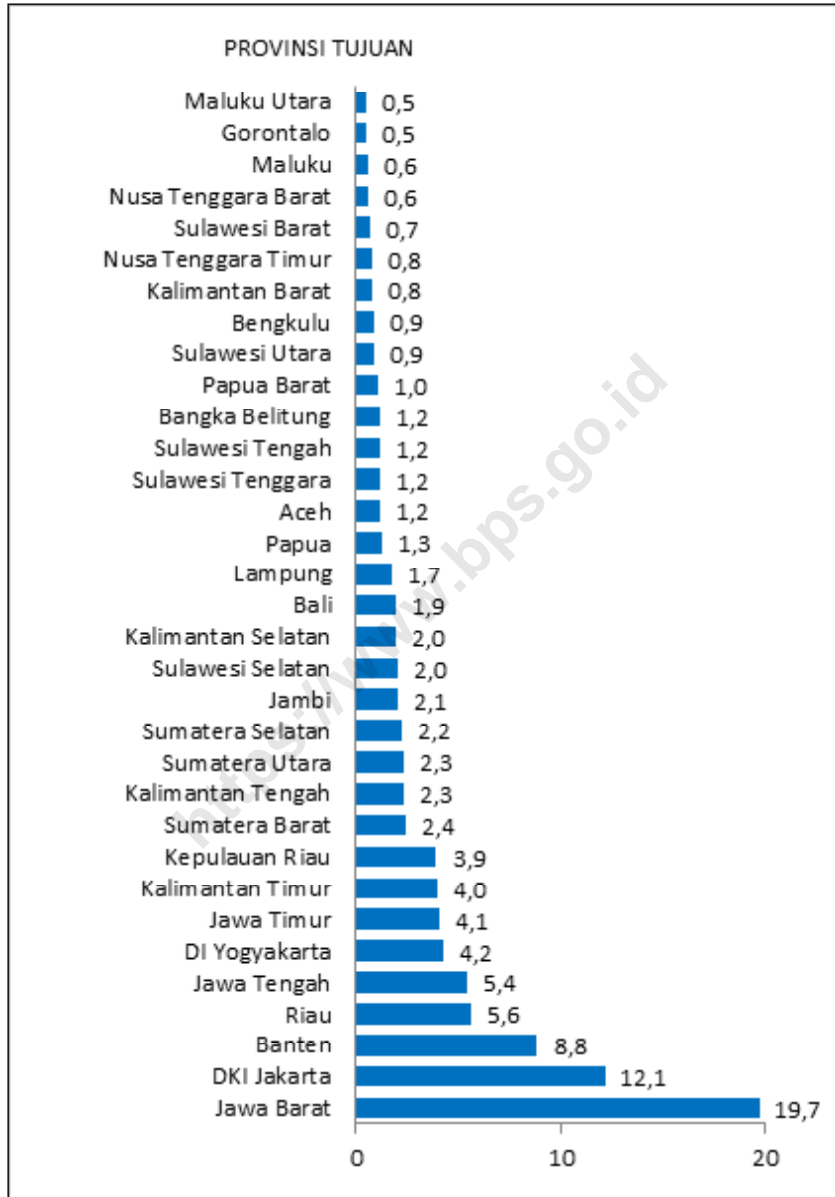
Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah tujuan migran sejak era tahun 2000an hingga kini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang dialaminya. Posisi ini mengeser Provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta dimana pada era 90an merupakan daerah utama tujuan migran (Lampiran Tabel L4). Provinsi DI Yogyakarta yang berada di posisi ketiga memiliki daya tarik pada sektor pendidikan, tentunya daya tarik ini berbeda dengan kedua provinsi di atasnya.

3.2.1 Besaran dan Arus Migrasi Risen

Besaran dan arus migrasi antar provinsi memberikan gambaran sesungguhnya dari pergerakan atau perpindahan lima tahunan yang dilakukan oleh migran dimana besaran migran terdistribusi pada masing-masing provinsi. Pengamatan ini secara jelas dapat menentukan arah datang dan perginya migran tanpa dipengaruhi oleh jumlah penduduk daerah asal atau tujuan.

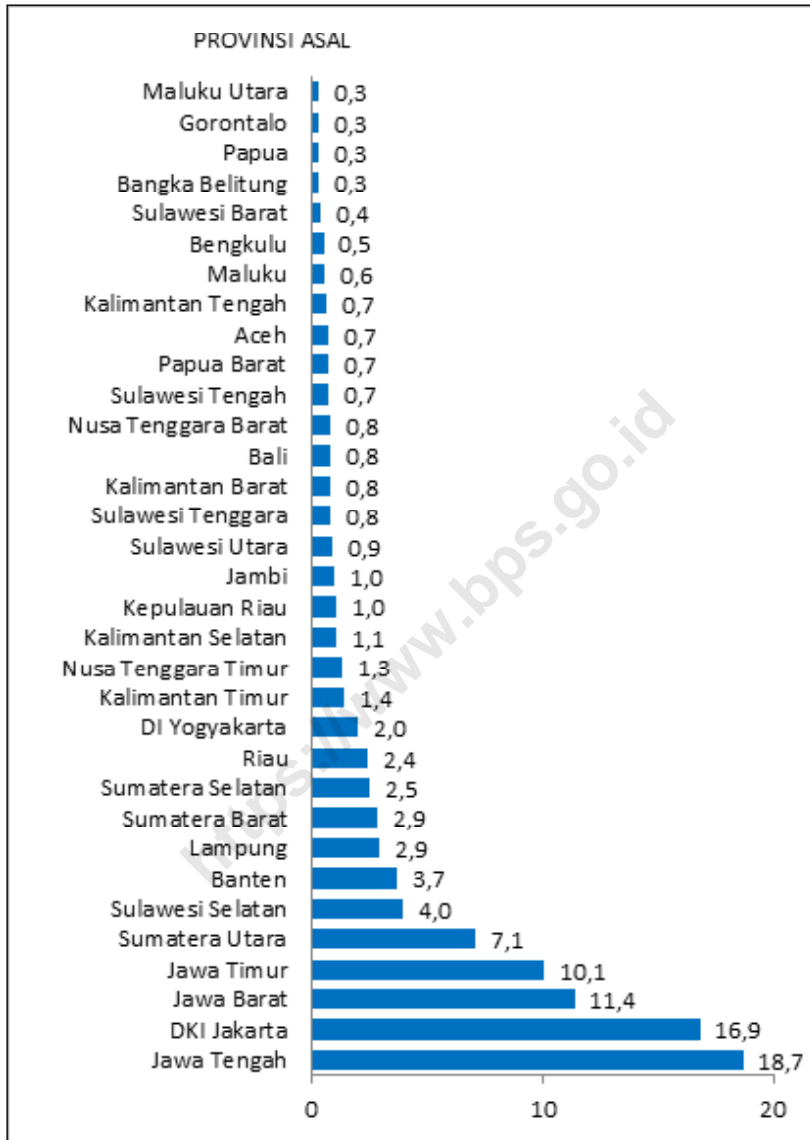
*Jawa Barat Masih
Menjadi Daerah
Tujuan Migran*

Gambar 5
Provinsi Tujuan Migran Risen, 2010



Besaran dan arus migrasi risen pada Gambar 5 menunjukkan bahwa provinsi tujuan migran didominasi oleh pulau Jawa. Terlihat provinsi-provinsi di Jawa memiliki persentase migran yang besar. Bila diurutkan, arus migran masuk risen menuju provinsi Jawa Barat sebesar 19,7 persen, DKI Jakarta 12,1 persen, Banten 8,8 persen, Riau 5,6 persen, Jawa Tengah 5,4 persen, DI Yogyakarta 4,2 persen dan Jawa Timur 4,1 persen.

Gambar 6
Provinsi Asal Migran Risen, 2010



Provinsi pengirim migran terbesar juga didominasi oleh Pulau Jawa (Gambar 6) yaitu sebesar 60,8 persen yang terdiri dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,7 persen, DKI Jakarta 16,9 persen, Jawa Barat sebesar 11,4 persen, Jawa Timur sebesar 10,1 dan Banten sebesar 3,7 persen.

Provinsi Jawa Tengah adalah pengirim migran terbesar

Besarnya persentase migran risen di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Jawa baik migrasi masuk maupun keluar, mengindikasikan bahwa telah terjadi mobilitas penduduk yang tinggi di pulau Jawa dibandingkan dengan di pulau lainnya. Sedangkan Provinsi Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Sumatera Selatan memiliki peran yang besar dalam menempatkan pulau Sumatera sebagai urutan kedua dalam hal persentase migran internal di Indonesia.

3.2.2 Pola Migrasi Provinsi

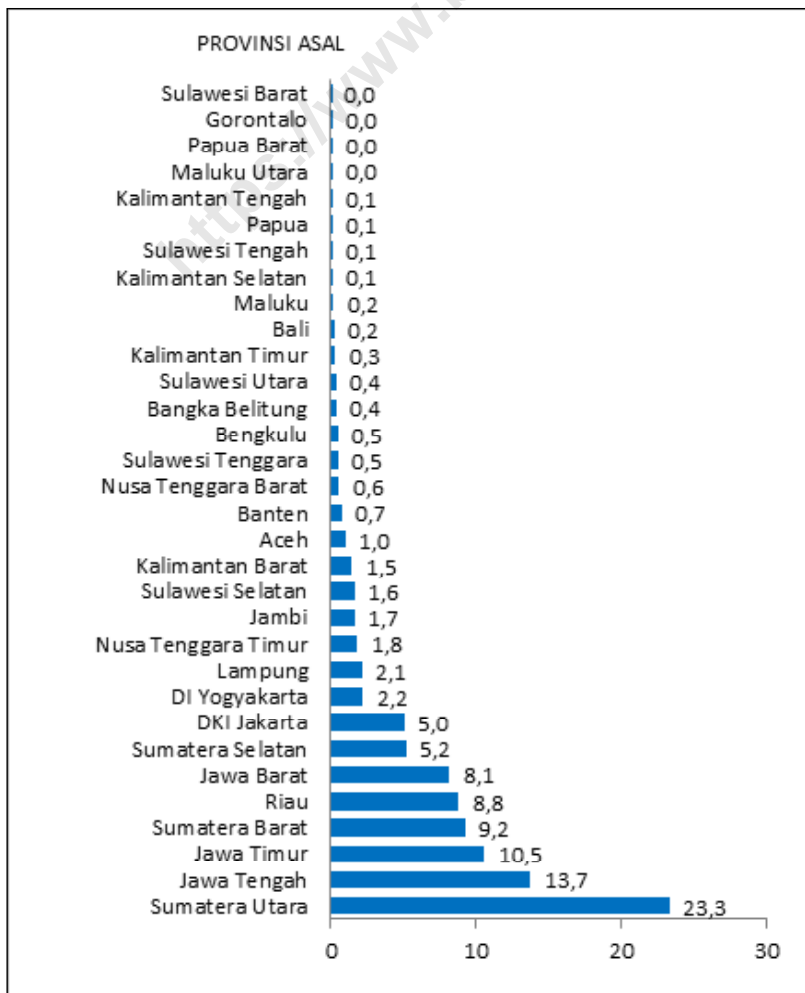
Indikator persentase migran masuk risen menempatkan Provinsi Kepulauan Riau pada posisi pertama sebagai propinsi dengan komposisi penerima migran risen terbesar jika dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Gambar 7 menunjukkan dari provinsi mana saja arus migran risen masuk

*Besaran Migrasi
Akan Besar Menuju
Jarak yang Dekat*

ke Provinsi Kepulauan Riau. Grafik memperlihatkan bahwa migran terbesar yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau berasal dari Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,3 persen, dari Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing sebesar 13,7 dan 10,5 persen, serta dari wilayah terdekat Kepulauan Riau lainnya yaitu Sumatera Barat dan Riau masing-masing sebesar 9,2 dan 8,8 persen.

Provinsi Sumatera Utara menjadi provinsi pengirim terbesar, fenomena ini menunjukkan tidak selalu provinsi-provinsi dari pulau Jawa menempati urutan pertama sebagai pengirim migran. Kedekatan jarak antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Kepulauan Riau diduga menjadi penyebab besarnya arus migrasi.

Gambar 7
Persentase Migran Masuk Risen ke Provinsi Kepulauan Riau, 2010



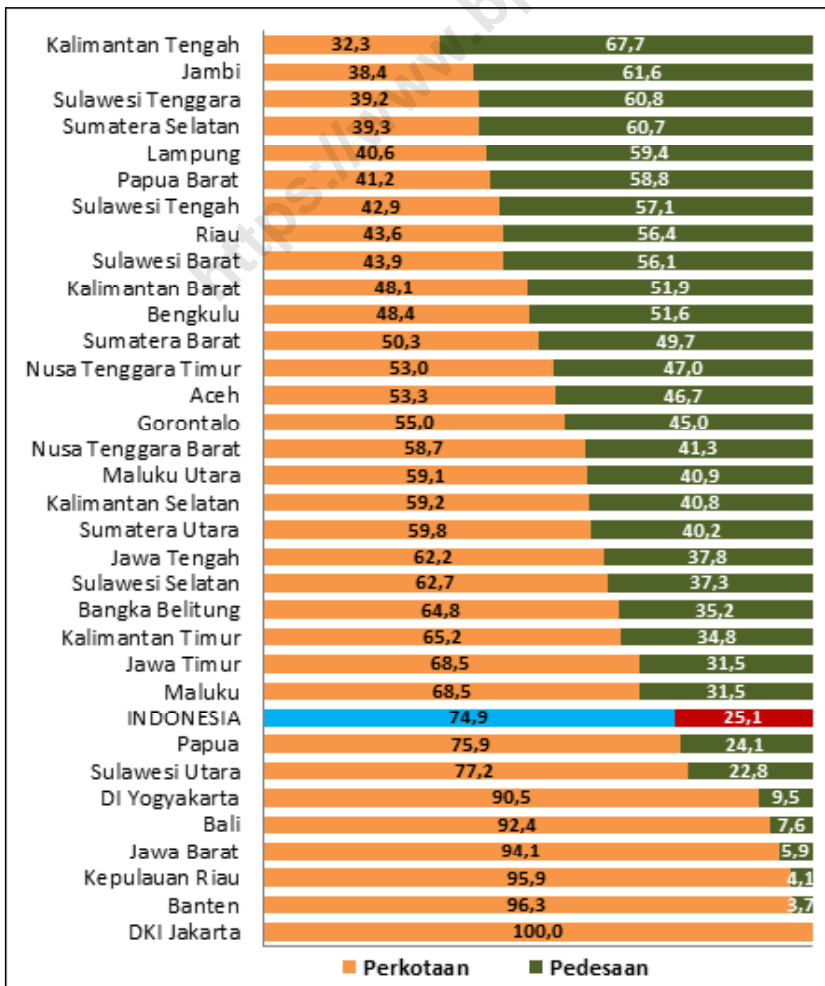
Cakupan analisis migrasi dapat dilakukan secara lebih rinci mengingat variabel yang dicakup dalam SP2010 cukup banyak. Berikut disajikan karakteristik migran risen secara umum dengan menggunakan karakteristik migran risen berdasarkan daerah tempat tinggal, jenis kelamin, umur, pendidikan dan pekerjaan.

3.2.3 Tempat Tinggal Migran Risen

Karakteristik migran risen berdasarkan daerah tempat tinggal, dibedakan menjadi daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Berdasarkan migrasi risen, perbandingan migran yang tinggal di daerah perkotaan dan pedesaan yaitu 3 : 1 (4,0 juta berbanding 1,4 juta). Bila dilihat menurut provinsi, migran banyak tinggal di daerah perkotaan di Provinsi Banten, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Bali dan DI. Yogyakarta. Bisa diduga bahwa kepindahan mereka ke Kepulauan Riau, Jawa Barat, Banten dan Bali adalah karena alasan pekerjaan.

Kota Menjadi Daya Tarik Migran Untuk Datang dan Tinggal

Gambar 8
Persentase Migran Risen Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2010

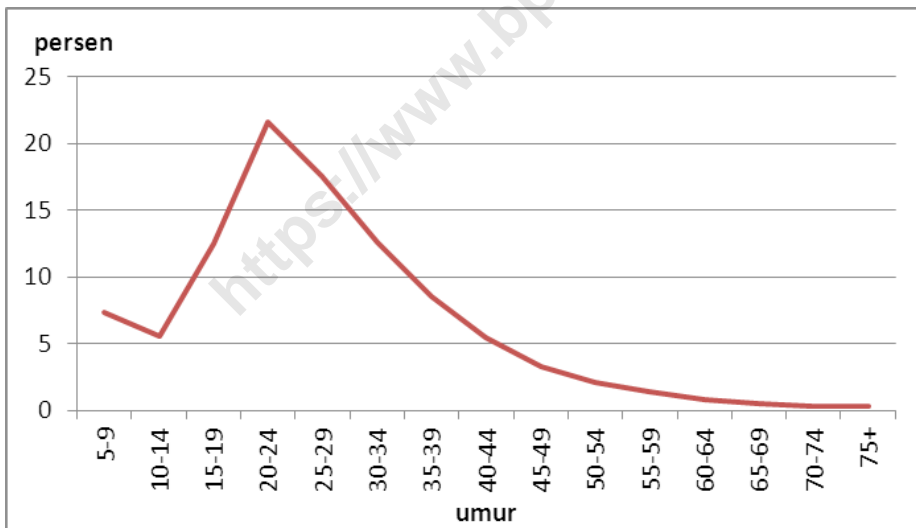


Alasan migran diperkuat dari hasil Supas*) 2005 yang menunjukkan bahwa 79 persen migran di Kepulauan Riau, sekitar 35 persen migran di Jawa Barat dan Banten serta 53 persen migran di Bali menyatakan alasan kepindahan mereka adalah karena pekerjaan. Sementara, banyaknya migran di perkotaan DI.Yogyakarta diduga adalah karena alasan sekolah. Hal ini ditunjang oleh hasil Supas 2005, dimana 48 persen migran di DI Yogyakarta pindah karena alasan pendidikan.

3.2.4 Umur dan Jenis Kelamin Migran Risen

Komposisi kelompok umur migran risen agak berbeda dengan komposisi migran seumur hidup. Komposisi umur migran risen menggambarkan kondisi demografis terkini dari migran. Besaran migran sudah terlihat pada kelompok umur yang lebih muda yaitu kelompok umur 15-19 tahun. Selanjutnya, puncak migran terbanyak ada pada kelompok yang lebih muda juga yaitu 20-24 tahun. kemudian jumlah migran turun dan mencapai nilai di bawah 10 persen pada kelompok umur 35-39 tahun.

Gambar 9
Distribusi Umur Migran Risen, 2010



Secara umum migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan. Komposisi ini berlaku pada hampir semua kelompok umur, kecuali migrasi pada kelompok umur 15-19 tahun ada perbedaan sekitar hampir 9 persen, dimana persentase migran perempuan jauh lebih besar dari migran laki-laki. Demikian juga ketika memasuki usia 65 tahun keatas migran perempuan lebih banyak dari pada migran laki-laki.

*Migran Laki-laki
Lebih Banyak
Daripada
Perempuan*

*) Survey penduduk Antar Sensus yang dilakukan di antara dua periode sensus penduduk.

Seperti dugaan sebelumnya bahwa kepindahan mereka berkaitan dengan terbukanya kesempatan kerja di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga. Namun hal ini perlu dibuktikan dengan data yang tersedia dengan analisis yang lebih rinci. Sedangkan kelompok umur 65 tahun, kembali jumlah migran perempuan mulai lebih banyak dibanding migran laki-laki. Kepindahan ini diduga berkaitan dengan alasan mengikuti anak, anggota keluarga lain atau famili lainnya, serta berkurangnya jumlah laki-laki pada kelompok umur 65 tahun keatas karena kematian.

Tabel 4
Pola dan Persentase Migran Risen Menurut Umur dan Jenis Kelamin, 2010

Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Persentase Migran	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5-9	51,84	48,16	386 416	7,4	108
10-14	51,27	48,73	290 236	5,5	105
15-19	45,83	54,17	655 841	12,5	85
20-24	50,30	49,70	1 129 249	21,6	101
25-29	52,50	47,50	919 634	17,6	111
30-34	55,37	44,63	659 068	12,6	124
35-39	57,82	42,18	447 557	8,5	137
40-44	60,08	39,92	284 301	5,4	151
45-49	59,51	40,49	169 752	3,2	147
50-54	56,98	43,02	111 323	2,1	132
55-59	56,14	43,86	72 989	1,4	128
60-64	51,00	49,00	43 646	0,8	104
65-69	49,01	50,99	27 981	0,5	96
70-74	44,51	55,49	18 189	0,3	80
75 +	39,70	60,30	18 190	0,3	66
Jumlah	52,57	47,43	5 235 778	100,0	111

Pola Umur Migran di Jawa Tengah dan Kepulauan Riau

Pola kelompok umur migran masuk bila dilihat menurut provinsi tidak banyak berbeda. Tabel 5 memberikan gambaran migran masuk menurut umur di Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi pengirim migran dan di Provinsi Riau sebagai provinsi penerima migran. Persentase migran mulai besar pada kelompok umur 15-19 tahun sampai 30-34 tahun. Persentase terbesar ada pada kelompok umur 20-24 tahun terutama di Kepulauan Riau mencapai hampir 38 persen. Diluar kelompok umur 15-29 tahun, persentase migran masuk menurut kelompok umur lainnya lebih besar di Jawa Tengah daripada di Kepulauan Riau.

Tabel 5
Persentase Umur Migran Masuk Risen di Jawa Tengah dan Kepulauan Riau, 2010

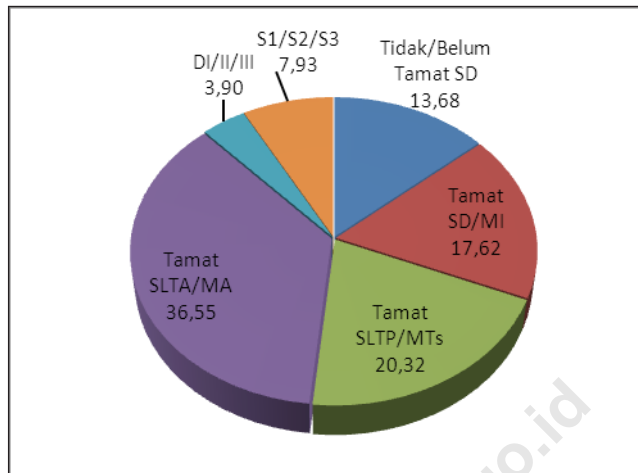
Kelompok Umur	Keluar	Masuk
	Jawa Tengah	Kep. Riau
(1)	(2)	(3)
5-9	9,05	3,72
10-14	6,75	2,56
15-19	10,20	11,28
20-24	16,97	37,89
25-29	16,88	20,44
30-34	13,66	10,15
35-39	9,77	5,37
40-44	6,47	3,12
45-49	3,85	1,78
50-54	2,43	1,34
55-59	1,72	0,95
60-64	0,88	0,59
65-69	0,58	0,38
70-74	0,36	0,24
75+	0,43	0,19
Jumlah	100,00	100,00

3.2.5 Pendidikan Migran Risen

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan seseorang termasuk migran. Bila salah satu tujuan bermigrasi adalah karena alasan mencari pekerjaan, maka pekerjaan yang didapatkan akan berkorelasi dengan pendidikan yang dimiliki. Migran dengan pendidikan yang tinggi akan berpeluang mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Dengan kata lain, pendidikan akan menentukan keberhasilan seseorang.

Karakteristik migran menurut pendidikan hanya disajikan untuk migran risen saja, mengingat data pendidikan tertinggi yang ditamatkan hanya ditanyakan kepada penduduk yang berumur 5 tahun ke atas. Secara nasional, lebih dari 40 persen migran berpendidikan minimal Tamat SLTA/Sederajat, dimana diantara migran tersebut yang berpendidikan sarjana mencapai 8 persen. Sebaliknya migran yang berpendidikan Tamat SD/Sederajat kebawah mencapai 31 persen.

Gambar 10
Persentase Migran Risen Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2010



Tabel 6 menyajikan profil pendidikan migran di beberapa daerah tujuan migrasi. Dari ke 6 provinsi yang merupakan daerah tujuan migrasi terlihat bahwa mayoritas migran berpendidikan SLTA/Sederajat. Persentase migran berpendidikan minimal S1 tercatat tinggi di Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Banten. Namun demikian, di daerah industri seperti di Jawa Barat dan Banten, migran yang berpendidikan SD ke bawah juga cukup tinggi di kisaran 25 persen. Bukan tidak mungkin para migran tanpa pendidikan dan yang berpendidikan rendah ini bekerja di sektor informal perkotaan yang sarat dengan 3D: dirty (kumuh), dangerous (berbahaya), dan difficult (sulit).

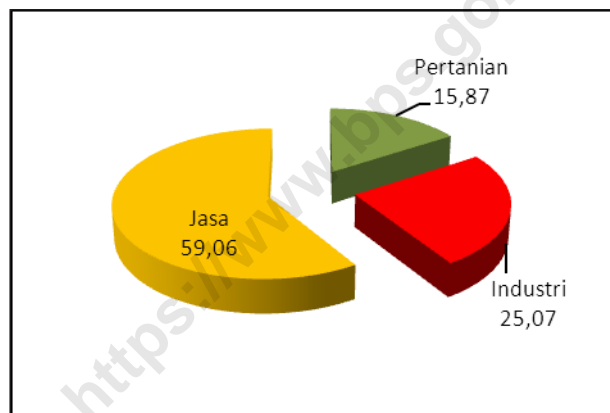
Tabel 6
Migran Risen Menurut Pendidikan Tertinggi, 2010

Provinsi	Tidak/ Belum Tamat SD	Tamat SD/MI	Tamat SLTP/ MTs	Tamat SLTA/ MA	DI/ DII/ DIII	S1/ S2/ S3	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kepulauan Riau	7,90	10,55	16,02	56,27	3,74	5,52	205 036
DKI Jakarta	7,56	20,24	28,15	33,49	3,44	7,12	635 921
Jawa Barat	12,68	12,72	16,99	42,88	5,27	9,47	1 030 003
DI Yogyakarta	8,38	8,18	13,08	56,69	4,24	9,43	222 413
Banten	11,43	14,27	20,58	39,61	4,74	9,39	462 898
Bali	9,61	18,40	24,72	35,67	4,10	7,51	99 596
Jumlah	10,39	14,45	20,17	41,98	4,49	8,51	2 655 867
Indonesia	13,68	17,62	20,32	36,55	3,90	7,93	5 235 778

3.2.6 Pekerjaan Migran Risen

Dari jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas sebesar 169 juta terdapat jumlah migran risen berumur 15 tahun ke atas sebesar 4,56 juta (2,70%). Dari jumlah tersebut, ada 3,05 juta atau 66,48 persen migran yang bekerja. Untuk memudahkan analisis, maka dari 19 lapangan pekerjaan yang terisi, dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar: Pertanian, Industri, dan Jasa. Hampir 60 persen migran bekerja di sektor jasa. Sektor jasa disini merupakan gabungan beberapa lapangan usaha antara lain: jasa perdagangan, hotel dan rumah makan, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, dan lainnya. Sementara, sisanya adalah migran yang bekerja di sektor industri sebesar 25,07 persen dan di sektor pertanian sebesar 15,87 persen.

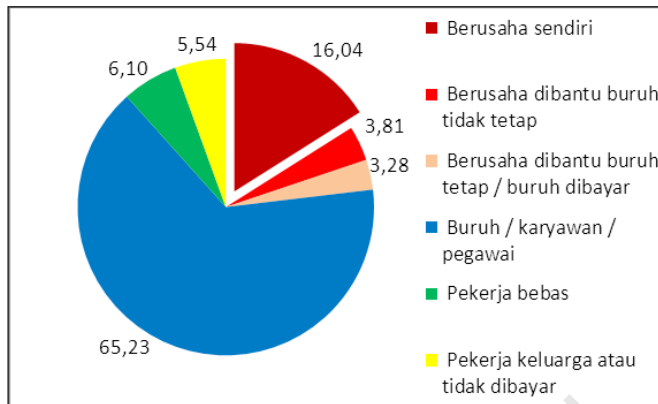
Gambar 11
Persentase Migran Risen Menurut Lapangan Pekerjaan, 2010



Secara nasional, lebih dari 65 persen migran yang bekerja mempunyai status pekerjaan sebagai buruh/karyawan/pegawai. Persentase kedua terbesar adalah migran yang berusaha sendiri. Perlu berhati-hati dalam menafsirkan data status berusaha sendiri, ini bukan berarti bahwa migran merupakan pengusaha berskala besar, namun perlu ditelusuri tentang lapangan usahanya, kemungkinan besar mereka ini bergerak di jasa perorangan.

Bila dikelompokkan menurut pekerja formal dan informal, ternyata 69 persen migran bekerja di sektor formal, yaitu mereka yang berstatus berusaha dibantu buruh tetap/dibayar serta mereka yang berstatus buruh/karyawan/pegawai. Sisanya 31 persen adalah sebagai pekerja informal, yaitu mereka yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, serta pekerja keluarga/tidak dibayar.

Gambar 12
Persentase Migran Risen Menurut Status Pekerjaan, 2010

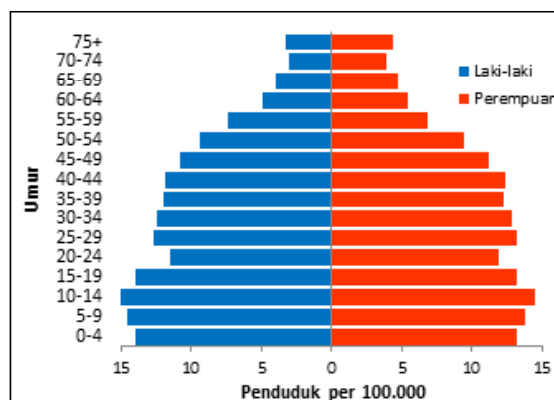


3.2.7 Hubungan Struktur Umur dan Migrasi

Analisis migrasi tidak saja hanya terfokus pada angka-angka migrasi serta karakteristik dari pelakunya. Sebagai salah satu komponen pertumbuhan penduduk, maka migrasi juga dapat mempengaruhi struktur umur penduduk suatu wilayah. Secara nasional, keterkaitan ini sesungguhnya dapat dijelaskan. Namun, karena secara nasional angka migrasi yang tersedia dari sensus penduduk hanya migrasi masuk menurut kelompok umur sedangkan migrasi keluar menurut kelompok umur tidak ada, maka sulit menjelaskan keterkaitan ini. Pada level nasional, data sekunder migrasi keluar internasional dari administrasi kependudukan sangat dibutuhkan.

Pada level provinsi keterkaitan migrasi dalam mempengaruhi struktur umur dapat dijelaskan dari data SP2010. Sebagai contoh, Provinsi Jawa Tengah menunjukkan laju pertumbuhan penduduk terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Jawa Tengah hanya sebesar 0,37 persen. Bila dilihat dari Piramida penduduk Jawa Tengah, terlihat adanya jumlah penduduk yang berkurang pada kelompok umur 20-24 tahun. Secara absolut, ada sekitar 300 ribuan lebih penduduk yang bermigrasi keluar Jawa Tengah, dengan komposisi lebih banyak migran keluar laki-laki dibanding migran keluar perempuan.

Gambar 13
Piramida Penduduk Jawa Tengah, 2010



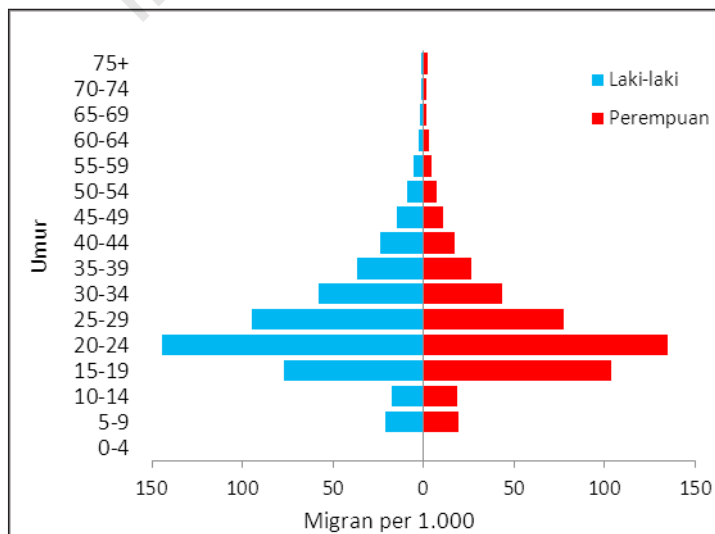
Dengan asumsi tidak ada perubahan yang berarti dengan tingkat fertilitas dan mortalitas di Jawa Tengah, maka dibuat telaah kaitan antara struktur penduduk Jawa Tengah dengan Migrasi. Migrasi yang dipakai adalah migrasi risen karena lebih menggambarkan kondisi perpindahan terkini.

Hasil migrasi neto pada tabel lampiran memperlihatkan bahwa persentase migrasi neto Jawa Tengah sebesar $-2,4$ persen selama periode 2000-2010. Tanda minus ($-$) menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai provinsi pengirim migran, dan angka $-2,4$ persen merupakan provinsi pengirim migran internal terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Telaah selanjutnya adalah melihat komposisi umur migran keluar Jawa Tengah. Hasil pengolahan menunjukkan tingginya persentase kelompok migran usia 20-24 tahun, yang secara tidak langsung dapat menjawab lekukan kedalam piramida penduduk Provinsi Jawa Tengah pada kelompok usia 20-24 tahun. Dari 979.860 migran keluar Jawa Tengah, hampir sepertiganya merupakan migran berusia 20-24 tahun. Sisanya menyebar disemua kelompok umur.

Dengan demikian data migrasi dapat menjawab permasalahan struktur umur penduduk suatu wilayah. Meskipun demikian, masih ada yang harus diperhitungkan yaitu migrasi Internasional yang keluar dari Jawa Tengah (TKI, TKW) baik dari segi jumlah dan komposisi umurnya, yang dalam hal ini tidak dapat dicakup dalam SP2010. Dari hasil telaah, ada selisih migran keluar pada kelompok umur 20-24 yang masih belum dapat dijelaskan. Pencatatan jumlah, umur dan asal dari migran keluar internasional menjadi sangat penting untuk menjelaskan fenomena ini.

Gambar 14
Migran Keluar Jawa Tengah, 2010



3.3 Migrasi Neto

Pada suatu wilayah, pasti terjadi mutasi penduduk. Penduduk yang pindah atau keluar dari suatu wilayah tidak serta merta akan mengurangi penduduk di wilayah asalnya, karena pasti ada orang lain yang datang ke wilayah atau pergi dari wilayah tersebut. Untuk mengetahui seberapa besar mutasi tersebut, maka di dalam migrasi ada yang disebut dengan migrasi neto. Bila migran yang keluar lebih banyak dari pada migran yang masuk (penduduk berkurang) maka migrasi neto bertanda negatif. Sementara bila migran yang masuk lebih besar dari migran yang keluar (penambahan penduduk) maka migrasi neto bertanda positif.

Beberapa provinsi memiliki migrasi neto bertanda positif, berikut ditampilkan tiga provinsi dengan migrasi neto bertanda positif terbesar seperti terlihat pada Tabel 9 Pada Provinsi Kepulauan Riau mendapat tambahan penduduk sebesar 10,2 persen, Kalimantan Tengah 4,5 persen dan Kalimantan Timur 4,3 persen.

Tabel 7
Migrasi Sebagai Penambah Penduduk, 2010

Provinsi	Neto	Penduduk
(1)	(2)	(3)
Kepulauan Riau	10,2	1 468 939
Kalimantan Tengah	4,5	1 974 949
Kalimantan Timur	4,3	3 141 684

Migrasi juga dapat berdampak terhadap berkurangnya penduduk seperti terlihat pada Lampiran Tabel L4. Berikut ditampilkan tiga provinsi yang migrasi netonya bertanda negatif terbesar. Pada Provinsi DKI Jakarta karena migrasi risen keluar lebih besar dibandingkan migrasi risen masuk maka berdampak mengurangi penduduk sebesar 2,9 persen, demikian pula untuk provinsi Jawa Tengah 2,4 persen dan Sumatera Utara, 2,2 persen.

Tabel 8
Migrasi Sebagai Pengurang Penduduk, 2010

Provinsi	Neto	Penduduk
(1)	(2)	(3)
DKI Jakarta	-2,9	8 679 909
Jawa Tengah	-2,4	29 569 696
Sumatera Utara	-2,2	11 478 174

Persentase migran neto menjelaskan bahwa migrasi memiliki pengaruh terhadap bertambah atau berkurangnya penduduk. Secara umum pada provinsi yang memiliki daya tarik kuat, akibat migrasi akan menambah jumlah penduduknya. Seperti yang terjadi pada Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Berbeda dengan Provinsi DKI Jakarta meskipun memiliki daya tarik yang kuat tetapi persentase migrasi neto menunjukkan tanda negatif yang semakin besar. Artinya migran yang meninggalkan DKI Jakarta semakin besar dan masuk ke provinsi tetangganya yaitu Jawa Barat dan Banten.

4. TREN MIGRASI INTERNAL 1990–2010

Data migrasi yang dikumpulkan dari sensus penduduk disusun secara periodik membentuk suatu tren migrasi. Besaran dan arus migrasi secara umum mengikuti hukum-hukum migrasi yang dapat berubah setiap saat mengikuti perkembangan yang terjadi pada wilayah yang diamati. Kondisi ekonomi, sosial dan politik pada suatu wilayah tentu akan erat kaitannya dengan perilaku migran, sehingga diperlukan informasi lain untuk menjawab perubahan-perubahan pada pola migrasi. Berikut dijelaskan mengenai perubahan migrasi pada masing-masing provinsi dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2010.

4.1 Tren Migrasi Seumur Hidup

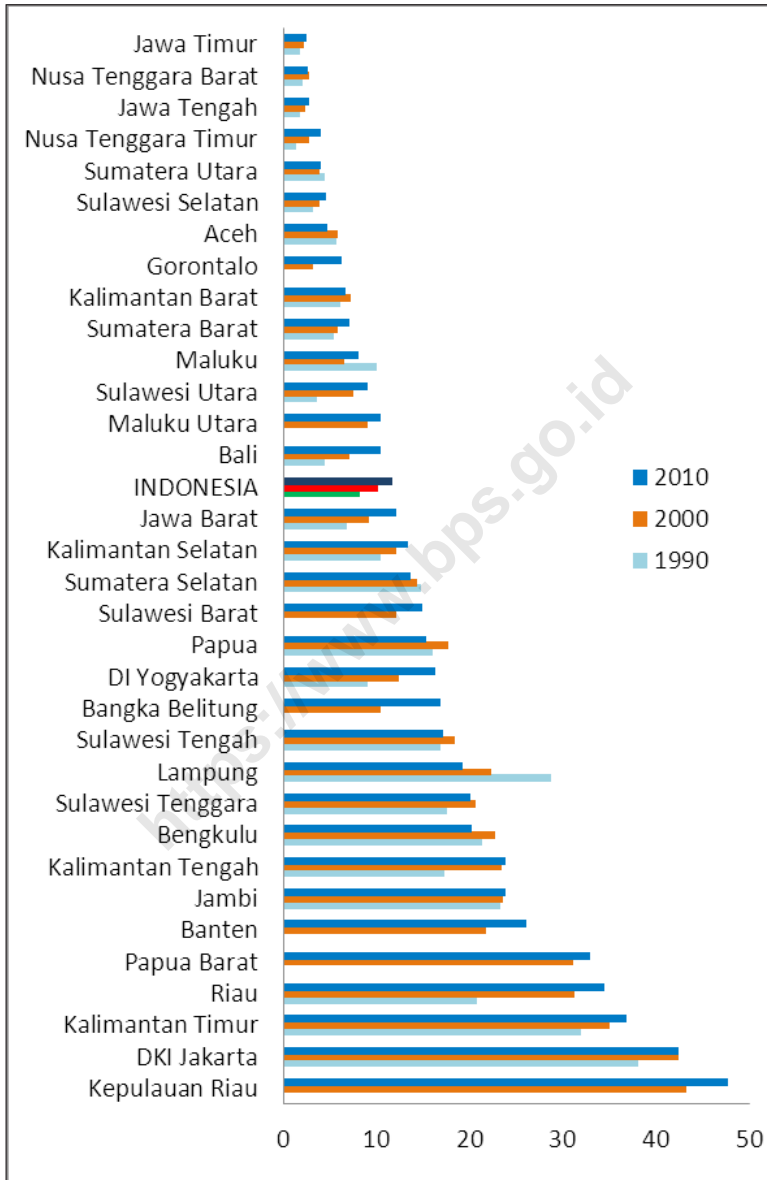
Dinamika perubahan penduduk dapat diamati dari perkembangan migrasi yang terjadi selama Republik Indonesia berdiri. Namun dalam penulisan ini periode yang diamati adalah sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2010 yang merupakan periode sebelum dan sesudah abad milenium. Pada beberapa provinsi yang terbentuk setelah tahun 2000, angka migrasi pada tahun sebelumnya tidak dapat ditampilkan karena masih tergabung dengan provinsi induknya.

Migrasi seumur hidup di Indonesia secara jelas mengalami kenaikan dari 8,2 persen di tahun 1990 menjadi 11,7 persen di tahun 2010 (Lampiran Tabel L3). Artinya, perpindahan penduduk semakin besar, baik secara absolut maupun persentasenya dan menegaskan bahwa pergerakan penduduk semakin mudah.

Tren migrasi seumur hidup menunjukkan bahwa persentase migran untuk masing-masing provinsi mengalami kenaikan (Gambar 15). Kecuali pada Provinsi Aceh, Bengkulu, Lampung dan Kalimantan Barat telah terjadi penurunan persentase migran seumur hidup dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Sementara kenaikan persentase migran seumur hidup tertinggi terjadi pada Provinsi Kepulauan Riau, Riau, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur.

*Perpindahan Penduduk
Semakin Meningkat*

Gambar 15
Tren Persentase Migran Seumur Hidup 1990-2010



4.2 Tren Migrasi Risen

Dinamika perubahan penduduk dapat diamati dari perkembangan migrasi risen yang mencerminkan perpindahan yang baru saja terjadi. Dalam penulisan ini periode yang diamati adalah tahun 1990, 2000 dan 2010, dimana menjelaskan penjelasan perpindahan yang terjadi lima tahun sebelum sensus penduduk berlangsung. Periode 1990-2010 ini merupakan suatu episode sebelum dan saat memasuki abad milenium. Namun pada beberapa provinsi yang terbentuk setelah tahun 2000, angka migrasi risen pada tahun 1990 tidak dapat ditampilkan karena masih tergabung dengan provinsi induknya.

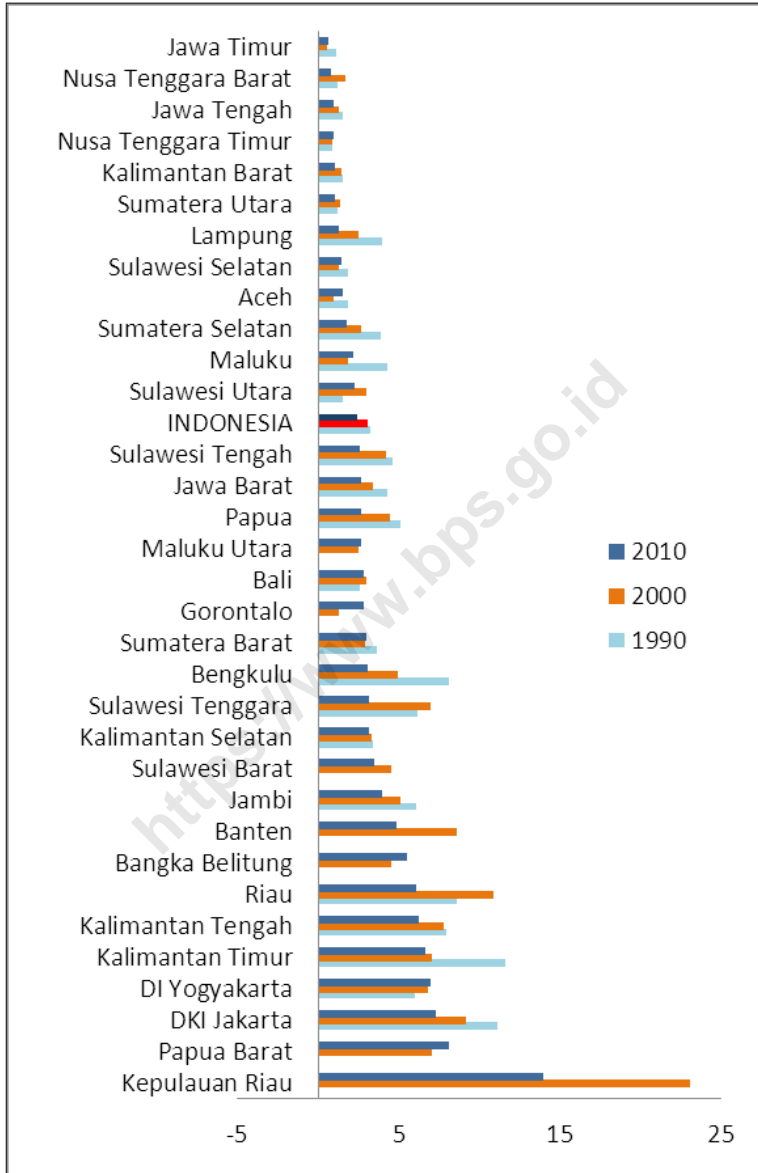
*Peningkatan Migrasi
Mengindikasikan
Perpindahan Semakin
Mudah*

Meskipun jumlah migran risen secara absolut naik, namun persentase migran risen secara nasional mengalami penurunan dari 3,2 persen menjadi 2,4 persen ditahun 2010. Persentase migran risen untuk masing-masing provinsi sangat bervariasi, ini menjelaskan bahwa perpindahan penduduk pada tingkat lebih rendah sangat dinamis (Gambar 16). Perpindahan ini dipengaruhi daya tarik dan daya dorong wilayah tersebut. Dinamika migrasi risen juga menjelaskan perubahan fenomena yang terjadi akibat perubahan ekonomi dan politik.

Pada Provinsi DKI Jakarta persentase penduduk yang berstatus migran risen terlihat mengalami penurunan dari 11,1 persen pada tahun 1990 menjadi 9,1 persen pada tahun 2000 dan 7,3 persen pada tahun 2010 (Lampiran Tabel L4). Penurunan ini tidak berarti daya tarik ekonomi Jakarta rendah tetapi lebih kepada hal lain seperti terbatasnya ketersediaan tempat tinggal di wilayah Jakarta. Hal yang berbeda terlihat pada Provinsi Bali, yang menunjukkan adanya kenaikan migrasi dari 2,6 persen pada tahun 1990 menjadi 2,8 persen pada tahun 2010. Kenaikan ini tidak terlalu tinggi karena pada tahun sebelumnya (tahun 2000) kenaikan sempat mencapai 3,0 persen. Isu mengenai ketidakamanan akibat 'Bom Bali' (Oktober 2002) yang pernah dialami Provinsi Bali mungkin dapat menjawab perubahan migrasi tersebut.

Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Papua Barat tren migrasi menunjukkan adanya peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir dari 7,0 persen pada tahun 2000 menjadi 8,4 persen pada tahun 2010. Sementara, Provinsi Papua yang pernah menjadi provinsi induknya mengalami penurunan dari 4,5 persen pada tahun 2000 menjadi hanya 2,7 persen di tahun 2010. Namun demikian angka migrasi ini tetap memberikan tambahan penduduk untuk Provinsi Papua, seperti terlihat pada tabel tren migrasi risen neto (Lampiran Tabel L5).

Gambar 16
Tren Persentase Migran Risen, 1990-2010



4.3 Tren Migrasi Neto Risen

Besaran dan arah migrasi dari suatu wilayah terkadang tidak selalu konsisten. Besaran, pola dan arus migrasi dari masing-masing provinsi dipengaruhi oleh perkembangan pembangunan di masing-masing provinsi. Gambar 17 menyajikan tren persentase migran risen neto dari tahun 1990-2010. Migrasi neto ini dapat menggambarkan apakah suatu provinsi menunjukkan daerah pengirim atau penerima migran. Bila migrasi neto bertanda positif (+) maka provinsi tersebut merupakan provinsi penerima migran. Sebaliknya bila migrasi bertanda negatif (-) maka provinsi tersebut merupakan provinsi pengirim migran.

Pola perubahan perpindahan yang cukup mencolok terjadi pada Provinsi Lampung dimana pada tahun 1990 mendapatkan tambahan penduduk, salah satunya akibat transmigrasi. Pada tahun 2000 selisih migrasi ini tidak ada, dan di tahun 2010 mencatatkan migrasi risen di Provinsi Lampung sebagai pengurang jumlah penduduk. Hal yang sama juga dialami Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Tabel L5).

Pada Provinsi Aceh, migrasi terlihat telah kembali berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penduduk dimana arus migrasi telah berbalik kembali. Pada tahun 1990 angka migrasi neto menunjukkan 0,2 persen, turun secara cepat menjadi -9,5 persen pada tahun 2000 dan mengalami kenaikan menjadi 0,6 persen pada tahun 2010. Perpindahan yang masuk lebih besar dari pada yang keluar mengindikasikan telah terjadi perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik di Provinsi Aceh. Demikian pula dengan Provinsi Maluku dimana perpindahan keluar sangat besar yang ditunjukkan oleh migrasi neto -7,8 persen pada tahun 2000. Namun perpindahan keluar semakin kecil dan terus berkurang hingga pada tahun 2010 migrasi neto menjadi -0,1 persen. Ini menunjukkan adanya arus balik kembali ke Provinsi Maluku.

Beberapa provinsi tetap memiliki angka migrasi neto yang positif seperti Provinsi Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua Barat dan Papua. Walaupun memiliki angka yang positif namun perubahannya juga menarik untuk ditelaah lebih lanjut.

Sementara Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan masih tercatat sebagai provinsi dengan migrasi neto negatif. Artinya sejak tahun 1990 hingga tahun 2010 mengalami pengurangan penduduk akibat migrasi.

Gambar 17
Tren Persentase Migran Neto Risen, 1990-2010



5. PENUTUP

Migrasi merupakan respon atas kesenjangan distribusi spasial atas lahan, tenaga kerja, kapital dan sumberdaya alam. Migrasi juga berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu wilayah, hal ini diperkuat oleh laporan Bank Dunia (2009) yang menyatakan bahwa migrasi, kepadatan dan jarak merupakan faktor yang mendukung kemajuan ekonomi wilayah.

Sesungguhnya migrasi penduduk memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan wilayah, dimana melalui mekanisme ini perbedaan komposisi penduduk suatu wilayah terbentuk. Wilayah-wilayah yang menjadi daerah tujuan migrasi memiliki struktur penduduk yang berbeda jika dibandingkan dengan daerah pengirimnya.

Karakteristik migran secara tidak langsung menunjukkan adanya selektivitas migran. Perbedaan sangat mudah diamati diantaranya dari komposisi demografis seperti umur, jenis kelamin, pendidikan dan ketenagakerjaan. Selektivitas migran yang terjadi pada proses migrasi telah memberikan perubahan-perubahan jangka panjang dalam komposisi demografis dan sosial baik di daerah asal maupun di daerah tujuan.

Berikut kesimpulan yang diperoleh dari data migrasi yang ditampilkan:

- 1) Sekitar 12 persen dari 237 juta penduduk Indonesia tinggal di provinsi yang berbeda dengan provinsi tempat lahirnya.
- 2) Lebih dari 47 persen penduduk Kepulauan Riau lahir di provinsi lain dan 42 persen penduduk DKI Jakarta lahir di provinsi lain.
- 3) Arus migrasi masih menuju provinsi-provinsi di pulau Jawa.
- 4) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta masih menjadi provinsi tujuan utama migran.
- 5) Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi penerima migran terbesar.
- 6) Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi pengirim migran terbesar.
- 7) Pola migrasi baik migrasi masuk maupun migrasi keluar masih didominasi oleh provinsi-provinsi besar di Pulau Jawa.
- 8) Migran lebih senang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan.
- 9) Penduduk umur 20-24 cenderung melakukan migrasi.
- 10) Laki-laki lebih cenderung melakukan migrasi dibandingkan perempuan.
- 11) Proporsi migran dengan pendidikan SLTA atau sederajat lebih besar dibanding tingkat pendidikan lainnya.
- 12) Dibandingkan dengan sektor pertanian, migran lebih banyak bekerja pada sektor jasa dan industri.
- 13) Lebih dari 65 persen migran bekerja sebagai karyawan atau buruh atau pegawai.

- 14) Migrasi dapat menyebabkan bertambah dan berkurangnya penduduk di suatu provinsi.
- 15) Peningkatan migrasi yang ditunjukkan oleh tren migrasi mengindikasikan perpindahan tempat tinggal di Indonesia semakin mudah.

Angka migrasi yang ditampilkan menunjukkan adanya pengaruh dari kebijakan pembangunan oleh pemerintah terhadap provinsi asal maupun provinsi tujuan migrasi. Kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan negara dimasa yang telah lalu berdampak kepada komposisi penduduknya. Kini dimana kebijakan pembangunan tidak lagi sentralistik dan berada pada tingkat kabupaten/kota pastinya pola migrasi juga akan menyesuaikan dengan arah perkembangan ekonomi yang baru. Dalam era otonomi daerah yang telah dan sedang berlangsung tentu terlihat adanya perubahan-perubahan dari pola dan arus migrasi. Telaah ini dapat dilakukan dengan melihat perpindahan pada tingkat kabupaten/kota, dimana telah tersedia data untuk menghitung perpindahan antar kabupaten/kota. Kajian yang lebih dalam sangat mungkin dilakukan mengingat masih banyak variabel yang dapat digali dari hasil SP2010.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananta, A., Anwar, EN dan Miranti, R., 1999. *Age-Sex Pattern of Migrants and Movers: A Multilevel Analysis on an Indonesian Data Set*. Singapore: Asian Meta Centre, research paper series.
- Badan Pusat Statistik, 2009. Profil Migran Hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2005, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik, 2010. Pedoman Pencacahan Sensus Peduduk 2010, Buku 6. Jakarta.
- Bogue, D.J., 1969. *Principle of Demography*. New York: John Wiley and Son, Inc.
- Hugo, G.J., 2001. Pola dan Tingkatan Perpindahan Penduduk Internal di Indonesia; Mobilitas Penduduk dari Dalam dan Luar Negeri: Implikasi Untuk Penyebaran HIV/AIDS. Jakarta: ILO Indonesia.
- Lee, E.S., 1987. Suatu Teori Migrasi; Seri Terjemahan no. 3. Yogyakarta: PPK Universitas Gajah Mada.
- Mantra, I.B., 2009. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shryock, H. dan Siegel, 1976. *The Methods and Material of Demography*. New York: Academic Press.
- Skeldon, R., 1990. *Population Mobility in Developing Countries: Reinterpretation* London and New York: Belhaven Press.
- Suryadinata, L., Ananta, A. dan Arifin, E.N., 2003. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik. Jakarta: LP3ES.
- The World Bank, 2009. Menata Ulang Geografi Ekonomi; Laporan Pembangunan Dunia. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Tirtosudarmo, R., 2009. Mencari Indonesia 2: Batas-Batas Rekayasa Sosial. Jakarta: LIPI.
- Todaro, M.P., 1992. Kajian Ekonomi Migrasi Internal di Negara Berkembang. Yogyakarta; PPK Universitas Gajah Mada.
- Zelinsky, W., 1971. *The Hypothesis of the Mobility Transition*. *Geographical Review*, 61: 165-89.

LAMPIRAN

<https://www.bps.go.id>

CATATAN TEKNIS

Pengukuran angka migrasi mengacu pada jenis migrasi:

- Migrasi Seumur Hidup

Seseorang dikategorikan sebagai **migran seumur hidup** jika provinsi atau kabupaten/kota tempat lahirnya berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal sekarang (pada waktu sensus).

- Migrasi Risen

Seseorang dikategorikan sebagai **migran risen** jika provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal lima tahun yang lalu berbeda dengan provinsi atau kabupaten/kota tempat tinggal sekarang (pada waktu sensus).

Dari jenis migrasi tersebut dapat dihitung migrasi masuk, keluar dan neto, masing-masing dengan rumus:

Persentase Migran Masuk Seumur Hidup di suatu provinsi X (M_{shm}) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk provinsi X yang tempat lahirnya di provinsi lain (P_{lm}) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di provinsi X (P) atau:

$$M_{shm} = \frac{P_{lm}}{P} \times 100$$

Persentase Migran Keluar Seumur Hidup di suatu provinsi X (M_{shk}) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang lahir di provinsi X tetapi sekarang tinggal di provinsi lain (P_{lk}) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di provinsi X (P) atau:

$$M_{shk} = \frac{P_{lk}}{P} \times 100$$

Persentase Migran Neto Seumur Hidup

Selisih antara P_{lm} dengan P_{lk} merupakan jumlah migrasi neto, sehingga persentase migrasi neto seumur hidup (M_{shn}) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M_{shn} = \frac{P_{lm} - P_{lk}}{P} \times 100$$

Untuk penghitungan migrasi seumur hidup, penduduk pertengahan tahun provinsi X atau P = penduduk semua umur yang tercatat pada kuesioner SP2010-L2, C1, C2.

Persentase Migran Risen Masuk di suatu provinsi X (M_{rm}) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk provinsi X yang 5 tahun lalu bertempat tinggal di provinsi lain ($P_{5+}m$) dengan jumlah penduduk 5 tahun keatas pertengahan tahun di provinsi X (P_{5+}) atau:

$$M_{rm} = \frac{P_{5+}m}{P_{5+}} \times 100$$

Persentase Migran Risen Keluar dari suatu provinsi X (M_{rk}) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang 5 tahun lalu tinggal di provinsi X tetapi pada saat sensus berada di provinsi lain ($P_{5+}k$) dengan jumlah penduduk 5 tahun ke atas pertengahan tahun di provinsi X (P) atau:

$$M_{rk} = \frac{P_{5+}k}{P_{5+}} \times 100$$

Persentase Migran Risen Neto

Selisih antara $P_{5+}m$ dengan $P_{5+}k$ merupakan jumlah migran risen neto, sehingga persentase migran risen neto dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$M_{rn} = \frac{P_{5+}m - P_{5+}k}{P_{5+}} \times 100$$

P_{5+} = penduduk yang berumur lima tahun keatas yang dicatat pada kuesioner SP2010-C1. Jadi ada perbedaan jumlah penduduk yang digunakan sebagai penyebut migrasi risen dengan jumlah penduduk secara keseluruhan hal ini terjadi karena tempat tinggal lima tahun yang lalu hanya ditanyakan pada kuesioner SP2010-C1.

LAMPIRAN

Tabel L1
Persentase Migran Seumur Hidup, SP2010

Provinsi	Migran Seumur Hidup			Jumlah Penduduk
	Masuk	Keluar	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4,8	5,9	-1,1	4 494 410
Sumatera Utara	4,0	17,7	-13,7	12 982 204
Sumatera Barat	7,1	23,8	-16,7	4 846 909
Riau	34,5	5,7	28,8	5 538 367
Jambi	23,9	5,9	18,0	3 092 265
Sumatera Selatan	13,7	10,5	3,2	7 450 394
Bengkulu	20,3	6,5	13,8	1 715 518
Lampung	19,2	9,4	9,9	7 608 405
Bangka Belitung	16,9	9,4	7,5	1 223 296
Kepulauan Riau	47,7	5,0	42,7	1 679 163
DKI Jakarta*)	42,5	31,2	11,2	9 607 787
Jawa Barat	12,1	5,8	6,3	43 053 732
Jawa Tengah	2,8	21,1	-18,3	32 382 657
DI Yogyakarta	16,3	26,1	-9,8	3 457 491
Jawa Timur	2,5	10,3	-7,8	37 476 757
Banten	26,0	5,2	20,8	10 632 166
Bali	10,5	6,9	3,5	3 890 757
Nusa Tenggara Barat	2,6	4,4	-1,8	4 500 212
Nusa Tenggara Timur	4,0	5,7	-1,8	4 683 827
Kalimantan Barat	6,7	5,2	1,5	4 395 983
Kalimantan Tengah	23,8	4,2	19,6	2 212 089
Kalimantan Selatan	13,4	8,6	4,8	3 626 616
Kalimantan Timur	36,8	4,2	32,6	3 553 143
Sulawesi Utara	9,1	9,6	-0,5	2 270 596
Sulawesi Tengah	17,2	4,6	12,5	2 635 009
Sulawesi Selatan	4,5	17,5	-13,0	8 034 776
Sulawesi Tenggara	20,0	7,9	12,1	2 232 586
Gorontalo	6,2	11,3	-5,0	1 040 164
Sulawesi Barat	14,9	7,7	7,1	1 158 651
Maluku	8,0	13,8	-5,8	1 533 506
Maluku Utara	10,4	6,1	4,3	1 038 087
Papua Barat	32,9	6,4	26,5	760 422
Papua	15,4	3,1	12,3	2 833 381
TOTAL	11,7	11,7		237 641 326

*) termasuk 3.458 diplomat yang tidak ada keterangan mengenai tempat lahirnya.

Tabel L2
Persentase Migran Risen, SP2010

Provinsi	Migran Seumur Hidup			Penyebut Migrasi*)	Jumlah Penduduk 5+
	Masuk	Keluar	Neto		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	1,6	1,0	0,6	3 979 337	4 000 981
Sumatera Utara	1,1	3,2	-2,2	11 478 174	11 531 511
Sumatera Barat	3,0	3,5	-0,5	4 327 665	4 343 668
Riau	6,0	2,6	3,4	4 863 966	4 892 468
Jambi	3,9	1,9	2,0	2 747 649	2 770 366
Sumatera Selatan	1,7	1,9	-0,2	6 666 500	6 683 551
Bengkulu	3,1	1,8	1,3	1 534 663	1 539 711
Lampung	1,3	2,3	-0,9	6 842 376	6 869 602
Bangka Belitung	5,5	1,6	4,0	1 091 506	1 095 448
Kepulauan Riau	14,0	3,7	10,2	1 468 939	1 478 124
DKI Jakarta	7,3	10,2	-2,9	8 679 909	8 777 963
Jawa Barat	2,7	1,5	1,1	38 850 386	38 929 097
Jawa Tengah	1,0	3,3	-2,4	29 569 696	29 671 375
DI Yogyakarta	7,0	3,2	3,7	3 191 301	3 200 568
Jawa Timur	0,6	1,5	-0,9	34 258 467	34 552 847
Banten	4,9	2,0	2,8	9 533 758	9 581 834
Bali	2,8	1,2	1,6	3 548 090	3 556 066
Nusa Tenggara Barat	0,8	1,0	-0,2	3 997 970	4 024 786
Nusa Tenggara Timur	1,0	1,7	-0,7	4 069 140	4 088 480
Kalimantan Barat	1,0	1,1	0,0	3 931 951	3 943 583
Kalimantan Tengah	6,2	1,7	4,5	1 974 949	1 979 291
Kalimantan Selatan	3,1	1,7	1,4	3 256 753	3 270 224
Kalimantan Timur	6,7	2,3	4,3	3 141 684	3 161 835
Sulawesi Utara	2,3	2,2	0,1	2 061 042	2 068 478
Sulawesi Tengah	2,6	1,7	0,9	2 334 370	2 345 516
Sulawesi Selatan	1,5	2,9	-1,4	7 215 316	7 243 871
Sulawesi Tenggara	3,1	2,2	1,0	1 956 885	1 964 013
Gorontalo	2,9	1,8	1,1	932 746	933 471
Sulawesi Barat	3,5	2,0	1,5	1 017 947	1 020 587
Maluku	2,2	2,3	-0,1	1 339 515	1 345 967
Maluku Utara	2,7	1,6	1,0	908 021	910 643
Papua Barat	8,1	2,6	5,6	659 890	666 713
Papua	2,7	1,6	1,1	2 471 853	2 519 986
TOTAL	2,4	2,4		213 902 414	214 962 624

*) penduduk 5 tahun keatas yang ditanya mengenai tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Tabel L3
Tren Persentase Migran Seumur Hidup 1990-2010

Provinsi	Migran Seumur Hidup		
	1990	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,7	5,8	4,8
Sumatera Utara	4,4	3,9	4,0
Sumatera Barat	5,4	5,8	7,1
Riau	20,8	31,3	34,5
Jambi	23,3	23,5	23,9
Sumatera Selatan	14,8	14,4	13,7
Bengkulu	21,3	22,7	20,3
Lampung	28,7	22,3	19,2
Bangka Belitung	-	10,5	16,9
Kepulauan Riau	-	43,3	47,7
DKI Jakarta	38,2	42,4	42,5
Jawa Barat	6,8	9,2	12,1
Jawa Tengah	1,8	2,3	2,8
DI Yogyakarta	9,1	12,3	16,3
Jawa Timur	1,7	2,2	2,5
Banten	-	21,7	26,0
Bali	4,4	7,0	10,5
Nusa Tenggara Barat	2,0	2,8	2,6
Nusa Tenggara Timur	1,4	2,8	4,0
Kalimantan Barat	6,1	7,2	6,7
Kalimantan Tengah	17,2	23,5	23,8
Kalimantan Selatan	10,5	12,1	13,4
Kalimantan Timur	32,0	35,0	36,8
Sulawesi Utara	3,5	7,5	9,1
Sulawesi Tengah	16,8	18,4	17,2
Sulawesi Selatan	3,1	3,8	4,5
Sulawesi Tenggara	17,6	20,7	20,0
Gorontalo	-	3,2	6,2
Sulawesi Barat	-	12,1	14,9
Maluku	10,0	6,6	8,0
Maluku Utara	-	9,1	10,4
Papua Barat	-	31,1	32,9
Papua	16,0	17,8	15,4
Indonesia	8,2	10,2	11,7

Tabel L4
Tren Persentase Migran Risen, 1990-2010

Provinsi	Migran Risen		
	1990	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,9	1,0	1,6
Sumatera Utara	1,2	1,4	1,1
Sumatera Barat	3,6	2,9	3,0
Riau	8,6	10,9	6,0
Jambi	6,0	5,1	3,9
Sumatera Selatan	3,8	2,7	1,7
Bengkulu	8,1	5,0	3,1
Lampung	4,0	2,5	1,3
Bangka Belitung	-	4,5	5,5
Kepulauan Riau	-	23,1	14,0
DKI Jakarta	11,1	9,1	7,3
Jawa Barat	4,3	3,4	2,7
Jawa Tengah	1,5	1,2	1,0
DI Yogyakarta	6,0	6,8	7,0
Jawa Timur	1,1	0,6	0,6
Banten	-	8,6	4,9
Bali	2,6	3,0	2,8
Nusa Tenggara Barat	1,2	1,7	0,8
Nusa Tenggara Timur	0,9	0,8	1,0
Kalimantan Barat	1,5	1,5	1,0
Kalimantan Tengah	8,0	7,8	6,2
Kalimantan Selatan	3,4	3,3	3,1
Kalimantan Timur	11,6	7,1	6,7
Sulawesi Utara	1,5	3,0	2,3
Sulawesi Tengah	4,6	4,2	2,6
Sulawesi Selatan	1,8	1,3	1,5
Sulawesi Tenggara	6,2	6,9	3,1
Gorontalo	-	1,3	2,9
Sulawesi Barat	-	4,5	3,5
Maluku	4,3	1,8	2,2
Maluku Utara	-	2,5	2,7
Papua Barat	-	7,0	8,1
Papua	5,1	4,5	2,7
Indonesia	3,2	3,1	2,4

Tabel L5
Tren Persentase Migran Neto Risen, 1990-2010

Provinsi	Migran Neto Risen		
	1990	2000	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,2	-9,5	0,6
Sumatera Utara	-1,9	-2,2	-2,2
Sumatera Barat	-1,3	-3,3	-0,5
Riau	5,3	8,2	3,4
Jambi	2,4	1,2	2,0
Sumatera Selatan	0,2	0,2	-0,2
Bengkulu	5,3	2,4	1,3
Lampung	1,4	0,0	-0,9
Bangka Belitung	-	0,3	4,0
Kepulauan Riau	-	18,5	10,2
DKI Jakarta	-2,3	-2,0	-2,9
Jawa Barat	2,7	1,5	1,1
Jawa Tengah	-3,1	-2,4	-2,4
DI Yogyakarta	1,5	2,3	3,7
Jawa Timur	-1,1	-1,1	-0,9
Banten	-	5,7	2,8
Bali	0,3	1,3	1,6
Nusa Tenggara Barat	-0,1	0,2	-0,2
Nusa Tenggara Timur	-0,8	-0,8	-0,7
Kalimantan Barat	-0,1	0,1	0,0
Kalimantan Tengah	4,9	6,2	4,5
Kalimantan Selatan	0,1	1,0	1,4
Kalimantan Timur	7,4	5,1	4,3
Sulawesi Utara	-0,8	0,8	0,1
Sulawesi Tengah	2,7	2,5	0,9
Sulawesi Selatan	-0,8	-1,7	-1,4
Sulawesi Tenggara	2,9	5,5	1,0
Gorontalo	-	-3,3	1,1
Sulawesi Barat	-	2,0	1,5
Maluku	1,8	-7,4	-0,1
Maluku Utara	-	-2,4	1,0
Papua Barat	-	2,2	5,6
Papua	2,8	2,3	1,1

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710

Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. : (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

ISBN: 978-979-064-307-9

